

**KAJIAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KUMUH DALAM MEWUJUDKAN KOTA
BERKELANJUTAN**

**(Studi Kasus : Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota
Cimahi)**

TUGAS AKHIR



Oleh:

Yhossy Buge Mahrezeki

183060061

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2022**

**KAJIAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN
KUMUH DALAM MEWUJUDKAN KOTA BERKELANJUTAN
(Studi Kasus : Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota
Cimahi)**

TUGAS AKHIR

*Karya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Perencanaan Wilayah dan Kota dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan
Kota, Fakultas Teknik, Universitas Pasundan*



Oleh:

Yhossy Buge Mahrezeki

183060061

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2022**

**PERNYATAAN ORIGINALITAS DAN TIDAK MELAKUKAN
PLAGIARISME TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yhossy Buge Mahrezeki
NRP : 183060061
Judul Tugas Akhir : Kajian Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Dalam Mewujudkan Kota Berkelanjutan (Studi Kasus : Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi)

Menyatakan bahwa karya tulis ini adalah hasil karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiarisme, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari karya tulis ini terbukti bukan hasil sendiri dan saya dinyatakan melakukan tindakan plagiarisme sebagaimana diamanatkan dalam Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Saya bersedia mempertanggungjawabkan tindakan saya dan menerima sanksinya.

Bandung, 27 Agustus 2022

yang menyatakan,



(Yhossy Buge Mahrezeki)

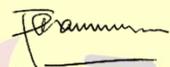
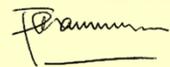
**KAJIAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KUMUH DALAM MEWUJUDKAN KOTA
BERKELANJUTAN**

**(Studi Kasus : Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota
Cimahi)**

Oleh:

Yhossy Buge Mahrezeki
NRP.183060061

Menyetujui,

- | | | |
|------------------|-----------------------------------|---|
| 1. Pembimbing I | Dr. Ir. Firmansyah., M.T. | () |
| 2. Pembimbing II | Apriadi Budi Raharja, S.T., M.Si. | () |
| 3. Penguji | Ibnu Kusuma Ardhi, S.T., M.T | () |
| 4. Ketua Sidang | Dr. Ir. Firmansyah., M.T. | () |

Mengetahui,

**Koordinator
TA dan Sidang Sarjana**

**Ketua Program
Studi Perencanaan Wilayah dan Kota**



(Dr. Ir. Firmansyah., M.T.)



(Deden Syarifudin, S.T., M.T.)

**KAJIAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KUMUH DALAM MEWUJUDKAN KOTA
BERKELANJUTAN**

**(Studi Kasus : Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota
Cimahi)**



Yhossy Buge Mahrezeki

NRP.183060061

Menyetujui dan menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

(Dr.Ir. Firmansyah,M.T.)

(Apriadi Budi Raharja,S.T.,M.Si.)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH TUGAS AKHIR**

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yhossy Buge Mahrezeki
NRP : 183060061
Judul Tugas Akhir : Kajian Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Dalam Mewujudkan Kota Berkelanjutan (Studi Kasus : Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi)

Demi kepentingan akademik bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni menyetujui untuk memberikan karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir/Proyek Akhir ini kepada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Pasundan **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** beserta perangkatnya.

Dengan demikian Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Pasundan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta (HaKi).

Bandung, 27 Agustus 2022

yang menyatakan,



(Yhossy Buge Mahrezeki)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, Shalawat serta salam senantiasa dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ucapan syukur tidak henti kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Kajian Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Dalam Mewujudkan Kota Berkelanjutan (Studi Kasus : Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi)”. Dalam penyusunan laporan ini, penulis banyak sekali memperoleh bantuan. Untuk itu dengan kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.Ir. Firmansyah,M.T., selaku dosen pembimbing utama tugas akhir atas kesediaan, keikhlasan, membimbing, mendukung, dan mendoakan peneliti dalam penyelesaian tugas akhir ini.
2. Bapak Apriadi Budi Raharja,S.T.,M.Si.,selaku co-pembimbing utama tugas akhir atas kesediaan, keikhlasan, membimbing, mendukung, dan mendoakan peneliti dalam penyelesaian tugas akhir ini
3. Bapak Deden Syarifudin S.T.,M.T., selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pasundan.
4. Dosen beserta staf Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Pasundan atas ilmu dan dukungannya selama menjalani perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi.
5. Kedua orang tuaku ama Iwan Sentosa Hs dan ine Kausar, yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat dalam setiap langkah yang peneliti lewati sejak awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi.

6. Rossa Lisikmi Ketiara, Beru Ulen Suci, dan Ivana Nisa Setangke, yang selalu memberikan keceriaan dan dorongan semangat yang selalu diberikan kepada penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Awan, Anan, Ibu Lilih, dan Om Wen, yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Azkiana, dan Yuni Bahgie, yang selalu memberikan keceriaan dan dorongan semangat yang selalu diberikan kepada penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. F. Nadya Nandipinta, Aulia Irina Septiani, Disti Aulialistiani, Zulfa Mulia, dan Sally Febrianti yang memberikan doa, bantuan, dan dukungan.
10. Teman-teman satu pembimbing, dan angkatan 2018 *Urban Renewal* yang selalu mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi di setiap langkah yang penyusun lalui.
11. Semua pihak yang baik langsung maupun tidak langsung, membantu penulis mempercepat penyelesaian laporan Tugas Akhir ini.

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini masih terdapat kekurangan . Oleh karena itu, peneliti sangat menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk saat ini maupun masa mendatang untuk perkembangan ilmu pengetahuan, *Aamiin.*

Bandung, 27 Agustus 2022



(Yhossy Buge Mahrezeki)

ABSTRAK

KAJIAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH DALAM MEWUJUDKAN KOTA BERKELANJUTAN

(Studi Kasus : Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi)

Oleh:

Yhossy Buge Mahrezeki

NRP.183060061

Tujuan ke 11 dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah diinisiasi oleh Sekretariat SDGs/Bappenas Indonesia adalah kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan, dimana target 2030 adalah memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua, meningkatkan mutu permukiman kumuh. Kawasan permukiman kumuh Rancabentang Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan seluas 27,08 Ha. Kecamatan Cimahi Selatan termasuk kawasan industri dan pergudangan yang sudah terbangun, dan sebagian besar Kecamatan Cimahi Selatan kawasan permukiman yang bercampur dengan kegiatan industri, sehingga harus dilakukan penanganan agar tidak memperluas atau memperburuk kondisi permukiman kumuh. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskannya arahan penanganan permukiman kumuh Kawasan Rancabentang Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan dalam mewujudkan permukiman inklusif dan berkelanjutan, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Analisis yang dilakukan meliputi analisis tingkat kekumuhan, skoring, analisis spasial, serta analisis potensi dan masalah permukiman kumuh di Kelurahan Cibeureum. Dari hasil analisis diperoleh bahwa tingkat kekumuhan pada Kelurahan Cibeureum sedang, dan hasil kajian status keberlanjutan pada aspek sosial-ekonomi masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan aspek fisik-lingkungan. Arahan penanganan penelitian ini adalah dilakukan perbaikan dan pemeliharaan terhadap kondisi fisik-lingkungan pada permukiman kumuh di Kelurahan Cibeureum berupa fisik bangunan, penyediaan air minum, jaringan jalan, jaringan drainase, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.

Kata Kunci : Kawasan, Permukiman kumuh, Permukiman Inklusif-Berkelanjutan

ABSTRACT

STUDY OF IMPROVING THE ENVIRONMENTAL QUALITY OF SLUMS IN REALIZING SUSTAINABLE CITIES

(Case Study: Cibereum Village, South Cimahi District, Cimahi City)

Author:

Yhossy Buge Mahrezeki

NRP.183060061

The 11th goal in the Sustainable Development Goals (SDGs) that has been initiated by the SDGs/Bappenas Indonesia Secretariat is an inclusive, safe, resilient and sustainable city and settlement, where the 2030 target is to ensure access to decent, safe and affordable housing and basic services for all, improving the quality of slums. Rancabentang slum area, Cibereum Village, South Cimahi District, covers an area of 27.08 ha. South Cimahi Subdistrict is an industrial and warehousing area that has been built, with the function of the area being industrial activities, and most of South Cimahi District is a residential area mixed with industrial activities, so it must be handled so as not to expand or worsen the condition of slums. This study aims to formulate a direction for handling slums in the Rancabentang Area of Cibereum Village, South Cimahi District, in realizing inclusive and sustainable settlements, using a quantitative approach and a qualitative approach. The analysis carried out includes slum level analysis, scoring, spatial analysis, as well as analysis of the potential and problems of slums in Cibereum Village. From the results of the analysis, it was obtained that the level of slums in Cibereum Village is moderate, and the results of the study of sustainability status on socio-economic aspects are still relatively higher than the physical-environmental aspects. The direction for handling this research is to improve and maintain the physical-environmental conditions in slums in Cibereum Village in the form of physical buildings, drinking water supply, road networks, drainage networks, wastewater management, wastewater management, waste management, and fire protection.

Keywords : Areas, Slums, Inclusive-Sustainable Settlements

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORIGINALITAS DAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIARISME TUGAS AKHIR	i
HALAMAN PENGESAHAN I.....	i
HALAMAN PENGESAHAN II.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
KARYA ILMIAH TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Sasaran	6
1.3.1 Tujuan	6
1.3.2 Sasaran	6
1.4 Ruang Lingkup.....	6
1.4.1 Ruang Lingkup Substansi	6
1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah	7
1.5 Batasan Studi	9
1.6 Metodologi Penelitian.....	10
1.6.1 Teridentifikasinya karakteristik sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan, serta tingkat kekumuhan di Kawasan Rancabentang Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan.	10
1.6.2 Teridentifikasinya status permukiman berkelanjutan di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan.	28

1.6.3	Terumuskannya arahan penangan permukiman kumuh Kawasan Rancabentang Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan dalam mewujudkan permukiman inklusif dan berkelanjutan.....	47
1.6.4	Matriks Analisis	51
1.6.5	Kerangka Analisis	54
1.7	Kerangka Berfikir	55
1.8	Sistematika Penyusunan.....	56
BAB II TINJAUAN TEORI.....		57
2.1	Tinjauan Teori.....	57
2.1.1	Permukiman	57
2.1.2	Permukiman Kumuh	62
2.1.3	Faktor Penyebab Munculnya Kawasan Kumuh.....	67
2.1.4	Permukiman di Kawasan Industri	72
2.1.5	Kota Berkelanjutan	73
2.2	Tinjauan Kebijakan.....	91
2.2.1	Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	91
2.2.2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	94
2.2.3	Permen PU No.02 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	96
2.2.4	SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan	98
2.3	Best Practice.....	101
2.3.1	Indonesia.....	101
2.3.2	Luar Negri.....	106
2.4	Studi Terdahulu.....	110
2.4.1	Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Kampung-Kota dalam Rangka Pembangunan Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan: Pembelajaran dari Kasus Kota Bandung (Kustiwan & Ramadhan, 2019)	110
2.4.2	Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Yang Sehat. Studi Kasus : Kota Pangkalpinang (Hariyanto, 2007).....	112

2.4.3	Klasifikasi Karakteristik Dampak Industri Pada Kawasan Permukiman Terdampak Industri Di Cemani Kabupaten Sukoharjo (Pradani, 2017)	113
2.4.4	Strategi Penanganan Permukiman Kumuh di Area Pendukung Industri Kelurahan Krian, Kabupaten Sidoarjo (Qonita et al., 2021).....	114
2.4.5	Eksplorasi Pola Hidup Masyarakat Bugis Sebagai Dasar Penyusunan Kebijakan Pembangunan Inklusif Perumahan Dan Permukiman Di Kota Makassar(Arifuddin Akil, 2017).....	115
2.4.6	Pengelolaan Permukiman Kumuh Berkelanjutan Di Perkotaan (Wulfram I Ervianto, 2019)	117
2.4.7	Urbanization and Condition of Urban Slums in India (Chimankar, 2016)	118
BAB III GAMBARAN UMUM		115
3.1	Gambaran Umum Kebijakan tentang Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	115
3.1.1	Arahan Wilayah Pengembangan Tentang Permukiman.....	115
3.1.2	Arahan Kebijakan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	117
3.2	Gambaran Umum Wilayah Kota Cimahi	121
3.2.1	Karakteristik Fisik.....	121
3.3	Gambaran Umum Kecamatan Cimahi Selatan	121
3.3.1	Karakteristik Fisik.....	121
3.3.2	Penduduk dan Perekonomian.....	122
3.4	Gambaran Umum Kelurahan Cibeureum	123
3.4.1	Kondisi Geografis Kelurahan Cibeureum.....	123
3.4.2	Kondisi Demografi Kelurahan Cibeureum	124
3.4.3	Kondisi Sarana Dan Prasarana Kelurahan Cibeureum.....	126
3.4.4	Kawasan Industri.....	127
3.5	Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh Pada Kelurahan Cibeureum	130
3.5.1	Kondisi Fisik Lingkungan.....	133
3.5.2	Kondisi Sosial Budaya Ekonomi	142
BAB IV ANALISIS		144
4.1	Tingkat kekumuhan di Kawasan Rancabentang Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan.	144
4.1.1	Analisis Kekumuhan Fisik Bangunan.....	144

4.1.2 Analisis Kekumuhan Jalan Lingkungan.....	145
4.1.3 Analisis Kekumuhan Penyediaan Air Minum.....	147
4.1.4 Analisis Kekumuhan Jaringan Drainase	148
4.1.5 Analisis Kekumuhan Pengelolaan Air Limbah.....	150
4.1.6 Analisis Kekumuhan Pengelolaan Persampahan	151
4.1.7 Analisis Kekumuhan Proteksi Kebakaran.....	153
4.1.8 Tingkat Kekumuhan Kondisi Fisik Lingkungan Kawasan	154
4.2 Status permukiman berkelanjutan di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan.....	169
4.2.1 Aspek Fisik-Lingkungan.....	169
4.2.2 Aspek Sosial.....	191
4.2.3 Aspek Ekonomi.....	196
4.2.4 Aspek Lainnya	200
4.2.5 Penilaian Status Keberlanjutan	203
4.3 Arahan penangan permukiman kumuh Kawasan Rancabentang Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan dalam mewujudkan permukiman inklusif dan berkelanjutan.....	209
4.3.1 Potensi dan Masalah.....	209
4.3.2 Arahan Penangan	214
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	223
5.1 Kesimpulan	223
5.2 Rekomendasi.....	225
5.3 Kelemahan Penelitian	226
5.4 Studi Lanjutan.....	226
DAFTAR PUSTAKA.....	227
LAMPIRAN.....	I

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Luas Administrasi Kecamatan Cimahi Selatan	8
Tabel I. 2 Luas Wilayah Penelitian.....	9
Tabel I. 3 Tabel Observasi Lapangan	11
Tabel I. 4 Matriks Kuisisioner Sasaran 1 dan 2.....	13
Tabel I. 5 Kriteria Narasumber	14
Tabel I. 6 Objek Obsevasi.....	14
Tabel I. 7 Checklist Data Sekunder Sasaran 1	15
Tabel I. 8 Kriteria dan Indikator Penentuan Tingkat Kekumuhan.....	18
Tabel I. 9 Tabel Analisis Spasial (Buffering)	30
Tabel I. 10 Matriks Kriteria, Variabel, dan Indikator Permukiman Berkelanjutan	33
Tabel I. 11 Matriks Wawancara.....	48
Tabel I. 12 Kriteria Narasumber	49
Tabel I. 13 Matriks Analisis.....	51
Tabel II. 1 Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman .	92
Tabel II. 2 Matriks Studi Terdahulu.....	120
Tabel III. 1 Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Di Kota Cimahi	118
Tabel III. 2 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Cimahi Selatan dan Lokasi Kajian Tahun 2020	123
Tabel III. 3 Jenis Penggunaan Lahan Kelurahan Cibeureum.....	124
Tabel III. 4 Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Cibeureum.....	124
Tabel III. 5 Jenis Penduduk Berdasarkan Kategori.....	125
Tabel III. 6 Sarana dan Prasarana Lingkungan Di Kelurahan Cibeureum.....	126
Tabel III. 7 Industri di Kelurahan Cibeureum Tahun 2020	127
Tabel III. 8 Lokasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Cibeureum.....	131
Tabel III. 9 Kondisi Fisik Bangunan.....	133
Tabel III. 10 Kondisi Kondisi Pelayanan dan Kualitas Jalan Lingkungan	135
Tabel III. 11 Kondisi Penyediaan Air Minum	137
Tabel III. 12 Kondisi Fisik Jaringan Drainase Lingkungan.....	140

Tabel III. 13 Kondisi Genangan Air Hujan, dan Pemeliharaan Saluran Drainase	141
Tabel III. 14 Kondisi Pengelolaan Air Limbah.....	143
Tabel III. 15 Kondisi Kondisi Pengelolaan Persampahan	145
Tabel III. 16 Kondisi Proteksi Kebakaran Permukiman Kumuh di Kelurahan Cibeureum	147
Tabel III. 17 Legalitas Lahan/Rumah	148
Tabel III. 18 Partisipasi Masyarakat Di Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Cibeureum.....	142
Tabel IV. 1 Kekumuhan Pada Kondisi Fisik Bangunan	144
Tabel IV. 2 Kekumuhan Pada Jaringan Jalan Lingkungan	146
Tabel IV. 3 Kekumuhan Pada Penyediaan Air Minum.....	147
Tabel IV. 4 Kekumuhan Pada Saluran Drainase.....	149
Tabel IV. 5 Kekumuhan Pada Pengelolaan Air Limbah.....	150
Tabel IV. 6 Kekumuhan Pada Pengelolaan Persampahan	152
Tabel IV. 7 Kekumuhan Pada Kondisi Proteksi Kebakaran	153
Tabel IV. 8 Kondisi Fisik Lingkungan Pada RW 11	155
Tabel IV. 9 Kondisi Fisik Lingkungan Pada RW 12	156
Tabel IV. 10 Kondisi Fisik Lingkungan Pada RW 13	157
Tabel IV. 11 Kondisi Fisik Lingkungan Pada RW 26	158
Tabel IV. 12 Kondisi Fisik Lingkungan Pada RW 28	159
Tabel IV. 13 Kepadatan Bangunan dan Skor.....	169
Tabel IV. 14 Keteraturan Bangunan Kesesuaian Teknis Bangunan dan Skor.....	170
Tabel IV. 15 Kondisi Bangunan dan Skor	172
Tabel IV. 16 Ketersediaan dan Kondisi Jaringan Jalan dan Skor	173
Tabel IV. 17 Akses Air Minum dan Kebutuhan Air Minum dan Skor.....	174
Tabel IV. 18 Akses Terhadap MCK (Sanitasi) dan Skor.....	176
Tabel IV. 19 Akses Terhadap Sarana-Prasarana Persampahan, Pengelolaan/Pengangkutan Sampah Baik Dan Skor.....	177
Tabel IV. 20 Ketersediaan Dan Kondisi Jaringan Drainase Dan Skor	179
Tabel IV. 21 Akses Ruang Terbuka Publik dan Skor	180
Tabel IV. 22 Akses Sarana Kesehatan dan Skor.....	180

Tabel IV. 23 Ketersediaan Sarana Pendidikan dan Skor	181
Tabel IV. 24 Ketersediaan Transportasi Publik dan Skor.....	182
Tabel IV. 25 Kualitas, Pemanfaatan Keberadaan Ruang Terbuka Publik dan Skor	187
Tabel IV. 26 Kondisi Proteksi Kebakaran dan Skor	188
Tabel IV. 27 Ketersediaan Jaringan Evakuasi Bencana dan Skor	189
Tabel IV. 28 Kepadatan Penduduk dan Skor	191
Tabel IV. 29 Tingkat Pendidikan Penduduk dan Skor.....	192
Tabel IV. 30 Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Skor	193
Tabel IV. 31 Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi Lingkungan Hunian dan Skor	194
Tabel IV. 32 Mata Pencaharian Penduduk dan Skor	196
Tabel IV. 33 Tingkat Pendapatan dan Kesejahteraan Penduduk dan Skor	197
Tabel IV. 34 Tingkat Kepemilikan Kendaraan Pribadi dan Skor	199
Tabel IV. 35 Tingkat Adanya Kegiatan Ekonomi dan Skor	200
Tabel IV. 36 Legalitas Lahan/Rumah dan Skor.....	201
Tabel IV. 37 Manfaat Dari Keberadaan Komunitas dan Skor	202
Tabel IV. 38 Bantuan Pemerintah dan Skor	203
Tabel IV. 39 Teknik Penilaian Status Keberlanjutan.....	204
Tabel IV. 40 Teknik Penilaian Status Keberlanjutan.....	204
Tabel IV. 41 Potensi dan Masalah Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Cibeuem	209
Tabel IV. 42 Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Cibeuem	214

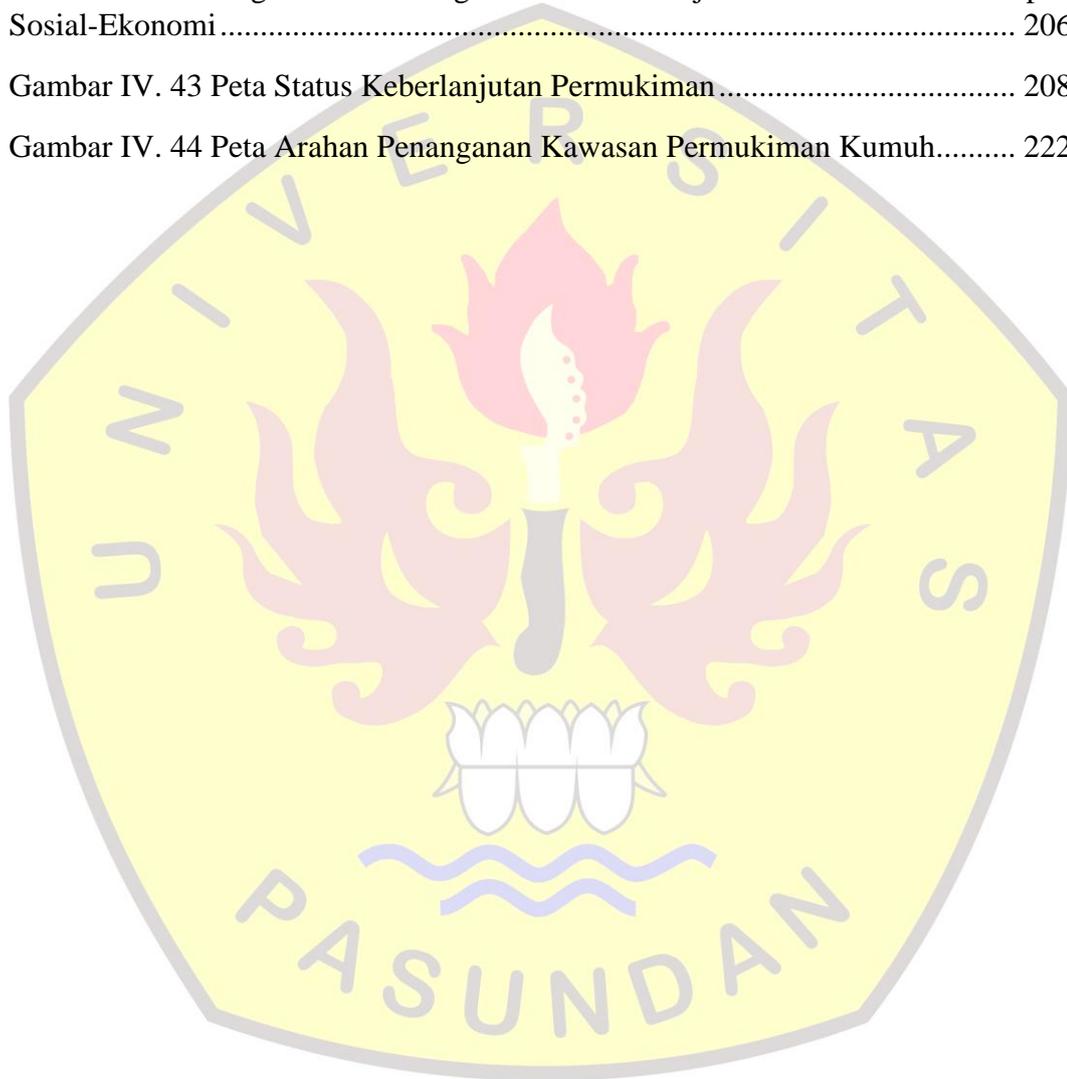
DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Luas Administrasi Kecamatan Cimahi Selatan.....	8
Gambar I. 2 Peta Administrasi Kelurahan Cibeureum.....	8
Gambar I. 3 Kerangka Analisis.....	54
Gambar I. 4 Kerangka Berfikir.....	55
Gambar II. 1 Aspek Penting dalam Pembangunan Perkotaan	63
Gambar II. 2 Konsep Pembangunan Berkelanjutan.....	74
Gambar II. 3 Elemen Pokok Pembangunan Berkelanjutan.....	88
Gambar II. 4 Keberhasilan program penanganan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta	105
Gambar II. 5 Hasil program ‘citywide’	107
Gambar II. 6 Permukiman kumuh akibat kegiatan industrialisasi yang gagal di Uganda	108
Gambar III. 1 Peta Rencana Pola Ruang Kelurahan Cibeureum.....	120
Gambar III. 2 Peta Guna Lahan Eksisting RW 11,12,13,26,28 Kelurahan Cibeureum.....	129
Gambar III. 3 Peta Permukiman Kumuh Kelurahan Cibeureum	132
Gambar III. 4 Kondisi Bangunan Permukiman Kumuh di Permukiman Kumuh Kelurahan Cibeureum	133
Gambar III. 4 Grafik Jumlah Kondisi Bangunan di Permukiman Kumuh Kelurahan Cibeureum.....	134
Gambar III. 6 Kondisi Jalan Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Cibeureum.....	135
Gambar III. 7 Grafik Jumlah Kondisi Jalan Lingkungan di Permukiman Kumuh Kelurahan Cibeureum	136
Gambar III. 7 Kondisi Penyediaan Air Minum Permukiman Kumuh di Kelurahan Cibeureum.....	137
Gambar III. 9 Grafik Jumlah Kondisi Penyediaan Air Minum di Permukiman Kumuh Kelurahan Cibeureum	138

Gambar III. 10 Kondisi Jaringan Darinase Permukiman Kumuh di Kelurahan Cibeureum	139
Gambar III. 11 Grafik Jumlah Kondisi Jaringan Drainase Lingkungan di Permukiman Kumuh Kelurahan Cibeureum	140
Gambar III. 12 Grafik Jumlah Kondisi Genangan Air Hujan, dan Pemeliharaan Saluran Drainase di Permukiman Kumuh Kelurahan Cibeureum	142
Gambar III. 13 Kondisi Jaringan Air Limbah Permukiman Kumuh	143
Gambar III. 14 Grafik Jumlah Kondisi Pengelolaan Air Limbah di Permukiman Kumuh Kelurahan Cibeureum	144
Gambar III. 15 Kondisi Persampahan Permukiman Kumuh	145
Gambar III. 16 Grafik Jumlah Kondisi Pengelolaan Persampahan di Permukiman Kumuh Kelurahan Cibeureum	146
Gambar III. 17 Grafik Jumlah Kondisi Proteksi Kebakaran di Permukiman Kumuh Kelurahan Cibeureum	148
Gambar III. 18 Grafik Jumlah Kondisi Legalitas Lahan/Rumah di Permukiman Kumuh Kelurahan Cibeureum	149
Gambar III. 19 Peta Jenis Hak atas Tanah	141
Gambar III. 20 Warung dan kegiatan pendidikan di permukiman kumuh Kelurahan Cibeureum	143
Gambar IV. 1 Grafik Kekumuhan Pada Kondisi Fisik Bangunan	145
Gambar IV. 2 Grafik Kekumuhan Pada Jaringan Jalan Lingkungan	146
Gambar IV. 3 Grafik Kekumuhan Pada Penyediaan Air Minum	148
Gambar IV. 4 Grafik Kekumuhan Pada Saluran Drainase	149
Gambar IV. 5 Grafik Kekumuhan Pada Pengelolaan Air Limbah	151
Gambar IV. 6 Grafik Kekumuhan Pada Pengelolaan Persampahan	152
Gambar IV. 7 Grafik Kekumuhan Pada Kondisi Proteksi Kebakaran	154
Gambar IV. 8 Peta Kondisi Permukiman Kumuh RW 11	161
Gambar IV. 9 Peta Kondisi Permukiman Kumuh RW 12	162
Gambar IV. 10 Peta Kondisi Permukiman Kumuh RW 13	163
Gambar IV. 11 Peta Kondisi Permukiman Kumuh RW 26	164
Gambar IV. 12 Peta Kondisi Permukiman Kumuh RW 28	165

Gambar IV. 13 Kondisi Permukiman Kumuh Kawasan Rancabentang Pada Tahun 2015, 2017, 2019, dan 2022	167
Gambar IV. 14 Peta Tingkat Kekumuhan Berdasarkan Kondisi Fisik -Lingkungan	168
Gambar IV. 15 Grafik Kepadatan Bangunan	170
Gambar IV. 16 Grafik Keteraturan Bangunan dan Kesesuain Teknis Bangunan	171
Gambar IV. 17 Grafik Kondisi Bangunan	172
Gambar IV. 18 Grafik Ketersediaan dan Kondisi Jaringan Jalan	174
Gambar IV. 19 Grafik Akses Air Minum dan Kebutuhan Air Minum.....	175
Gambar IV. 20 Grafik Akses Terhadap MCK (Sanitasi).....	176
Gambar IV. 21 Grafik Akses Terhadap Sarana-Prasarana Persampahan, Pengelolaan/Pengangkutan	178
Gambar IV. 22 Grafik Ketersediaan Dan Kondisi Jaringan Drainase	179
Gambar IV. 23 Peta Radius Pelayanan RTNH	183
Gambar IV. 24 Peta Radius Pelayanan Sarana Kesehatan.....	184
Gambar IV. 25 Peta Radius Pelayanan Sarana Pendidikan	185
Gambar IV. 26 Peta Radius Pelayanan Transportasi Publik.....	186
Gambar IV. 27 Grafik Kualitas, Pemanfaatan Keberadaan Ruang Terbuka Publik	187
Gambar IV. 28 Grafik Kondisi Proteksi Kebakaran	189
Gambar IV. 29 Grafik Ketersediaan Jaringan Evakuasi Bencana	190
Gambar IV. 30 Grafik Kepadatan Penduduk	191
Gambar IV. 31 Grafik Tingkat Pendidikan.....	192
Gambar IV. 32 Grafik Tingkat Partisipasi Masyarakat	193
Gambar IV. 33 Grafik Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi Lingkungan Hunian	196
Gambar IV. 34 Grafik Mata Pencaharian Penduduk (Tingkat Pengangguran) ..	197
Gambar IV. 35 Grafik Tingkat Pendapatan dan Kesejahteraan Penduduk	198
Gambar IV. 36 Grafik Tingkat Kepemilikan Kendaraan Pribadi	199
Gambar IV. 37 Grafik Tingkat Adanya Kegiatan Ekonomi	200

Gambar IV. 38 Grafik Tingkat Legalitas Lahan/Rumah	201
Gambar IV. 39 Grafik Tingkat Manfaat Dari Keberadaan Komunitas.....	202
Gambar IV. 40 Grafik Tingkat Manfaat Dari Bantuan Pemerintah.....	203
Gambar IV. 41 Diagram Perbandingan Nilai Keberlanjutan RW Berdasarkan Aspek Fisik -Lingkungan	205
Gambar IV. 42 Diagram Perbandingan Nilai Keberlanjutan RW Berdasarkan Aspek Sosial-Ekonomi	206
Gambar IV. 43 Peta Status Keberlanjutan Permukiman	208
Gambar IV. 44 Peta Arahan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh.....	222



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Desain Survei Tugas Akhir	I
Lampiran B. Lembaran Wawancara dan Hasil Wawancara.....	XXI
Lampiran C. Lembar Kuisisioner	XXVII
Lampiran D. Hasil Kuisisioner	XXXII
Lampiran E. Form Observasi	CXVI
Lampiran F. Hasil Observasi.....	CXVII
Lampiran H. Ilustrasi Kriteria Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	CXIX
Lampiran I. Dokumentasi Lapangan	CXXII
Lampiran J. Dokumentasi Survei	CXXIII
Lampiran K. SK Pembimbing Tugas Akhir	CXXIV
Lampiran L. Form Bimbingan Tugas Akhir Pembimbing 1	CXXV
Lampiran M. Form Bimbingan Tugas Akhir Pembimbing 2.....	CXXVI
Lampiran N. Surat Izin Penelitian Kesbangpol Jawa Barat	CXXVII
Lampiran O. Surat Balasan Izin Penelitian Kesbangpol Jawa Barat.....	CXXVIII

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota berkelanjutan adalah kota yang memiliki kemampuan, untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup di dalamnya serta dapat meningkatkan keseimbangan pada pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan dari kota berkelanjutan adalah untuk membangun permukiman manusia yang memiliki dampak lingkungan yang seminimal mungkin (Cohen, 2018). Kota merupakan suatu tata ruang permukiman berpenduduk dengan jumlah yang banyak di atas lahan perkotaan yang terbatas, yang pada umumnya bersifat nonagraris. (Muta'ali, 2019).

Migrasi desa-kota yang sifatnya masal, ditambah dengan pertumbuhan penduduk alami yang dimiliki kota itu sendiri, serta kesulitan pendatang untuk menemukan mata pencaharian yang menjamin hidup berkecukupan, telah melahirkan situasi miskinnya penghuni di kota (Muta'ali, 2019). Permasalahan permukiman adalah masalah yang rawan. Hal ini disebabkan jumlah yang tersedia jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk yang membutuhkannya, dan tidak memiliki kemampuan untuk membeli rumah yang layak huni, banyak masyarakat kota yang tinggal di permukiman yang sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan minimal.

Tujuan ke 11 dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah diinisiasi oleh Sekretariat SDGs/Bappenas Indonesia adalah kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan, dimana target 2030 adalah memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua, meningkatkan mutu permukiman kumuh, (Bappenas, 2020). Sedangkan berdasarkan SK Walikota Cimahi Nomor 653/ Kep.68.PU/2015 tentang Lokasi Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Cimahi Tahun 2015 terdapat sebanyak 15 kelurahan yang tersebar di 3 kecamatan, dengan

luas total 176,77 Ha, dimana lokasi permukiman kumuh tersebar di seluruh kecamatan Kota Cimahi, diantaranya Kecamatan Cimahi Selatan dengan tingkat kekumuhan sedang dengan luas kumuh 65,48 Ha, Kecamatan Cimahi Tengah dengan tingkat kekumuhan ringan hingga sedang dengan luas kumuh 105,44 Ha, dan Kecamatan Cimahi Utara dengan tingkat kekumuhan kumuh ringan dengan luas kumuh 5,94 Ha.

Kota Cimahi dan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 arahan pengembangan Kota Cimahi adalah mewujudkan kota dengan basis industri kreatif dan pengembangan Kota *Cyber*. Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019, sektor PDRB tertinggi di Kota Cimahi adalah sektor industri pengolahan yaitu sebesar 47,81%. Kecamatan Cimahi Selatan termasuk kawasan industri dan pergudangan yang sudah terbangun, dengan fungsi kawasan adalah kegiatan industri, dan sebagian besar Kecamatan Cimahi Selatan kawasan permukiman yang bercampur dengan kegiatan industri. Kecamatan Cimahi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 dalam strategi pengembangan struktur ruang termasuk kedalam Sub Wilayah Kota SWK C dengan pengembangan wilayah terutama untuk perumahan, perkantoran, militer, perdagangan dan jasa, industri serta industri kreatif berbasis telematika, dengan strategi pengembangan wilayah di SWK C terdiri dari mengembangkan perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang, mengembangkan kegiatan jasa dan perdagangan yang menunjang perkembangan kegiatan di PPK Baros, dan mengembangkan RTH kota, sehingga lokasi penelitian memiliki peran strategis dalam mewujudkan dalam tema pengembangan SWK C sebagai wilayah kompek yang mengembangkan perdagangan jasa, perkantoran, dan industri.

Kecamatan Cimahi Selatan berdasarkan SK Walikota Cimahi Nomor 653/Kep.68.PU/2015 tentang Lokasi Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Cimahi Tahun 2015 tersebut di empat kelurahan diantaranya adalah Kelurahan Cibereum dengan luas 27,08 Ha, Kelurahan Leuwigajah dengan luas 20,3 Ha, Kelurahan Utama dengan luas 14,92 Ha, dan Kelurahan Melong dengan

luas 3,18 Ha dengan keseluruhan wilayah tingkat kekumuhan sedang. Kelurahan Cibereum merupakan kawasan kumuh terluas di Kecamatan Cimahi Selatan tepatnya pada Kawasan Rancabentang (RW 11, RW 12, RW 13, RW 26, dan RW 28).

Peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2016-2020 sebanyak 257.649-473.132 jiwa penduduk di Kecamatan Cimahi Selatan (BPS Kota Cimahi), menimbulkan masalah bagi pemerintah daerah. Permasalahan tersebut diantaranya adalah penurunan kualitas lingkungan permukiman seperti kondisi bangunan tidak teratur, fasade bangunan tidak seragam, jarak antar bangunan sempit, akses sanitasi yang tidak layak (air limbah domestik, sampah, dan drainase lingkungan), belum optimalnya penyediaan layanan air bersih, kualitas jalan buruk dan masalah - masalah lingkungan yang lain.

Ditinjau dari perspektif sistem sosial, kampung kota merupakan sistem sosial yang kompleks, dihuni oleh beragam warga kota dengan latar belakang agama, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, etnis, bahkan aliran politik. Ditinjau dari perspektif ekonomi, kampung kota merupakan satu sistem ekonomi yang sangat dinamis dimana berbagai kegiatan usaha produktif penghuninya yang menjadi pendukung kegiatan ekonomi kota (Kustiwan, 2014). Pada saat yang bersamaan, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan kampung kota juga ditandai dengan berbagai masalah, antara lain tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, sehingga sebagian besar kampung menjadi kantong-kantong warga kota yang tidak sehat, tidak produktif, serta status dan legalitas lahannya yang tidak jelas kepemilikannya (Setiawan, 2010). Pada saat ini arah perencanaan kota saat ini cenderung jauh dari keberlanjutan, dimana permukiman yang berada di pusat kota atau sekitaran pusat kota terancam karena hanya dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan secara ekonomi. Oleh karena itu, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah belum adanya perhatian yang lebih pada pengembangan permukiman di kawasan perkotaan yang berorientasi pada aspek keberlanjutan secara fisik, sosial dan ekonomi.

Berdasarkan kondisi atau permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini difokuskan pada pengamatan kualitas lingkungan permukiman kumuh serta strategi mewujudkan permukiman inklusif permukiman kumuh di Kawasan Rancabentang Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan seluas 27,08 Ha. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi penanganan permukiman kumuh sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, sehingga masyarakat dapat tinggal di permukiman yang sesuai dengan standar dan syarat kesehatan, dan dapat mewujudkan permukiman yang inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Keberadaan aktivitas permukiman padat penduduk yang semakin berkembang di Kecamatan Cimahi Selatan ini, menimbulkan berbagai permasalahan penurunan kualitas lingkungan permukiman di kawasan perkotaan. Permasalahan yang terjadi di Kawasan Permukiman Kumuh Kecamatan Cimahi Selatan secara lebih dalam meliputi :

- Perkembangan permukiman kota ditandai dengan berbagai masalah, diantaranya tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, sehingga sebagian besar permukiman menjadi permukiman kota yang tidak sehat, tidak produktif, serta status dan legalitas lahannya yang tidak jelas kepemilikannya (Nugraha et al., 2021).
- Peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2016-2020 sebanyak 257.649-473.132 jiwa penduduk di Kecamatan Cimahi Selatan yang terus meningkat di Kota Cimahi menyebabkan kualitas lingkungan permukiman menurun, sedangkan kemampuan masyarakat untuk memperbaiki kualitas lingkungan jika terjadi kerusakan sangatlah kecil khususnya di Kecamatan Cimahi Selatan merupakan masyarakat menengah kebawah (BPS Kota Cimahi).
- Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 Kecamatan Cimahi Selatan termasuk kawasan industri dan pergudangan yang sudah terbangun, dengan fungsi kawasan adalah kegiatan industri, dan

sebagian besar Kecamatan Cimahi Selatan kawasan permukiman yang bercampur dengan kegiatan industri.

- Berdasarkan hasil observasi terdapat industri skala rumah tangga bercampur dengan permukiman masyarakat yang membuang limbah langsung ke selokan.
- Status penghuni dari rumah tinggal yang berada di kawasan kumuh adalah penyewa rumah 94% rumah sewa dan 6% hak milik. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat tuan tanah yang memiliki hak atas sebagian besar tanah di kawasan kumuh ini, kemudian mereka sewakan kepada penduduk lainnya (<https://perkim.id/pofil-pkp/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-cimahi/>)
- Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh di Kota Cimahi, namun penanganan yang direncanakan belum spesifik pada permukiman kumuh yang bercampur dengan kawasan industri (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Tahun 2017).
- Permukiman kumuh Rancabentang berada di wilayah rawan banjir, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Tahun 2017).

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa pertanyaan peneliti sebagai berikut :

- Bagaimana karakteristik, dan tingkat kekumuhan permukiman kumuh di Kawasan Rancabentang Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan?
- Bagaimana status/indeks keberlanjutan permukiman kumuh di Kawasan Rancabentang Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan?
- Bagaimana arahan penanganan yang sesuai dengan karakteristik permukiman kumuh Kawasan Rancabentang Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan?

1.3 Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah merumuskan arahan penanganan sesuai dengan karakteristik permukiman kumuh Kawasan Rancabentang Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan dalam mewujudkan permukiman inklusif dan berkelanjutan.

1.3.2 Sasaran

Sasaran yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Teridentifikasinya karakteristik sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan, serta tingkat kekumuhan di Kawasan Rancabentang Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan.
- b. Teridentifikasinya status permukiman berkelanjutan di Kawasan Rancabentang Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan.
- c. Terumuskannya arahan penanganan permukiman kumuh Kawasan Rancabentang Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan dalam mewujudkan permukiman inklusif dan berkelanjutan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian terbagi menjadi ruang lingkup substansi dan ruang lingkup wilayah yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1.4.1 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi yang harus dicapai dalam perumusan tujuan diatas dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut :

1. Teridentifikasinya karakteristik sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan, serta tingkat kekumuhan di Kawasan Rancabentang Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan.
 - a. Karakteristik sosial yang meliputi pendidikan penduduk untuk melihat seberapa besar pengetahuan dan pemahaman penduduk terhadap

lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni, dan kesehatan penduduk untuk melihat sejauh mana kekuatan yang dimiliki penduduk dari tingkat kesehatannya.

- b. Karakteristik fisik yang meliputi kondisi fisik bangunan, kondisi penggunaan prasarana, sarana, dan utilitas.
 - c. Karakteristik ekonomi yang meliputi tingkat pendapatan, diukur dari besarnya pendapatan yang diterima tiap KK dalam setiap bulannya, dan aktivitas ekonomi atau mata pencaharian penduduk, diukur dari besarnya jumlah penduduk yang bekerja dalam suatu bidang tertentu untuk melihat tingkat kemampuan dalam memperbaiki kualitas permukiman.
 - d. Teridentifikasinya tingkat kekumuhan pada setiap blok perumahan berdasarkan analisis identifikasi lokasi permukiman kumuh meliputi kondisi kekumuhan, sesuai dengan Permen PUPR No. 02/PRT/M/2016.
2. Teridentifikasinya status permukiman berkelanjutan di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan.
 3. Terumuskannya arahan penanganan permukiman kumuh Kawasan Rancabentang Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan dalam mewujudkan permukiman inklusif dan berkelanjutan

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Kota Cimahi memiliki luasan sekitar 4.023,73 Ha. Kota Cimahi terdiri dari Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Utara. Secara geografis lokasinya terletak diantara 107°30'30'' Bujur Timur - 107°34'30'' dan 6°50'00''-6°56'00'' Lintang Selatan.

Kecamatan Cimahi Selatan terdiri dari 5 (lima) kelurahan yang membawahi 115 (seratus lima belas) RW dan 688 (enam ratus delapan puluh delapan) RT,. Kecamatan Cimahi Selatan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara :Berbatasan dengan Kecamatan Cimahi Utara
- Sebelah Barat :Berbatasan dengan Kecamatan Batujajar
- Sebelah Selatan :Berbatasan dengan Kecamatan Margaasih, Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung dan Kota Bandung

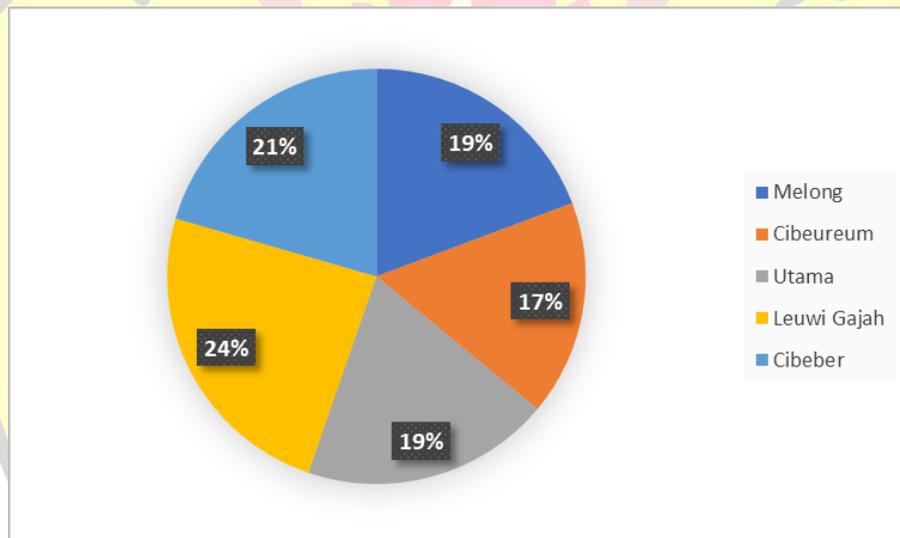
- Sebelah Timur :Berbatasan dengan Kecamatan Cicendo dan Kecamatan Andir Kota Bandung

Tabel I. 1 Luas Administrasi Kecamatan Cimahi Selatan

No	Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Melong	310	19,3
2	Cibeureum	270	16,94
3	Utama	310	19,00
4	Leuwi Gajah	390	24,26
5	Cibeber	330	20,50
Cimahi Selatan		1.690	100

Sumber: Kecamatan Cimahi Selatan Dalam Angka 2020

Wilayah Permukiman Kumuh



Sumber : Hasil analisis 2022

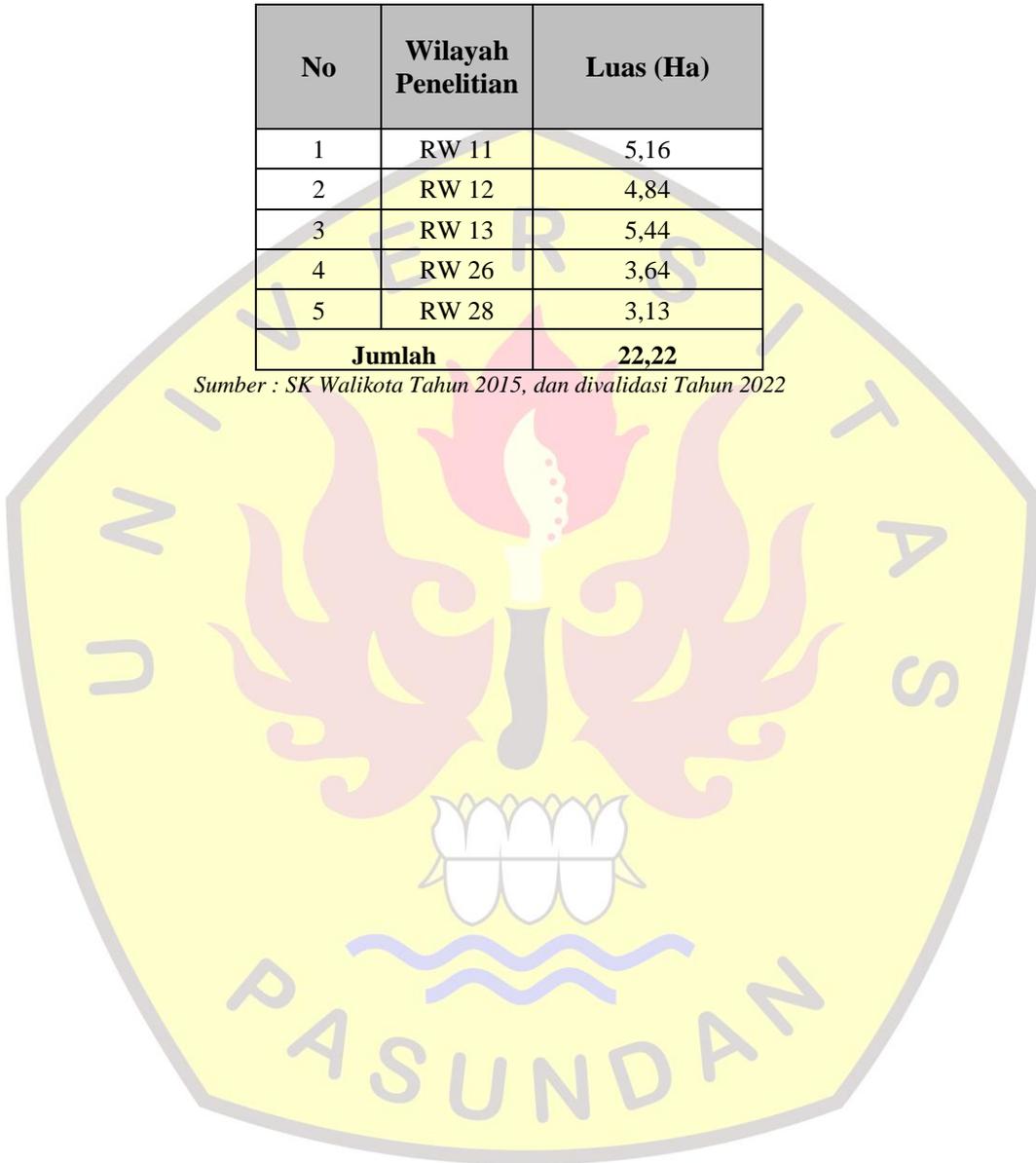
Gambar I. 1 Luas Administrasi Kecamatan Cimahi Selatan

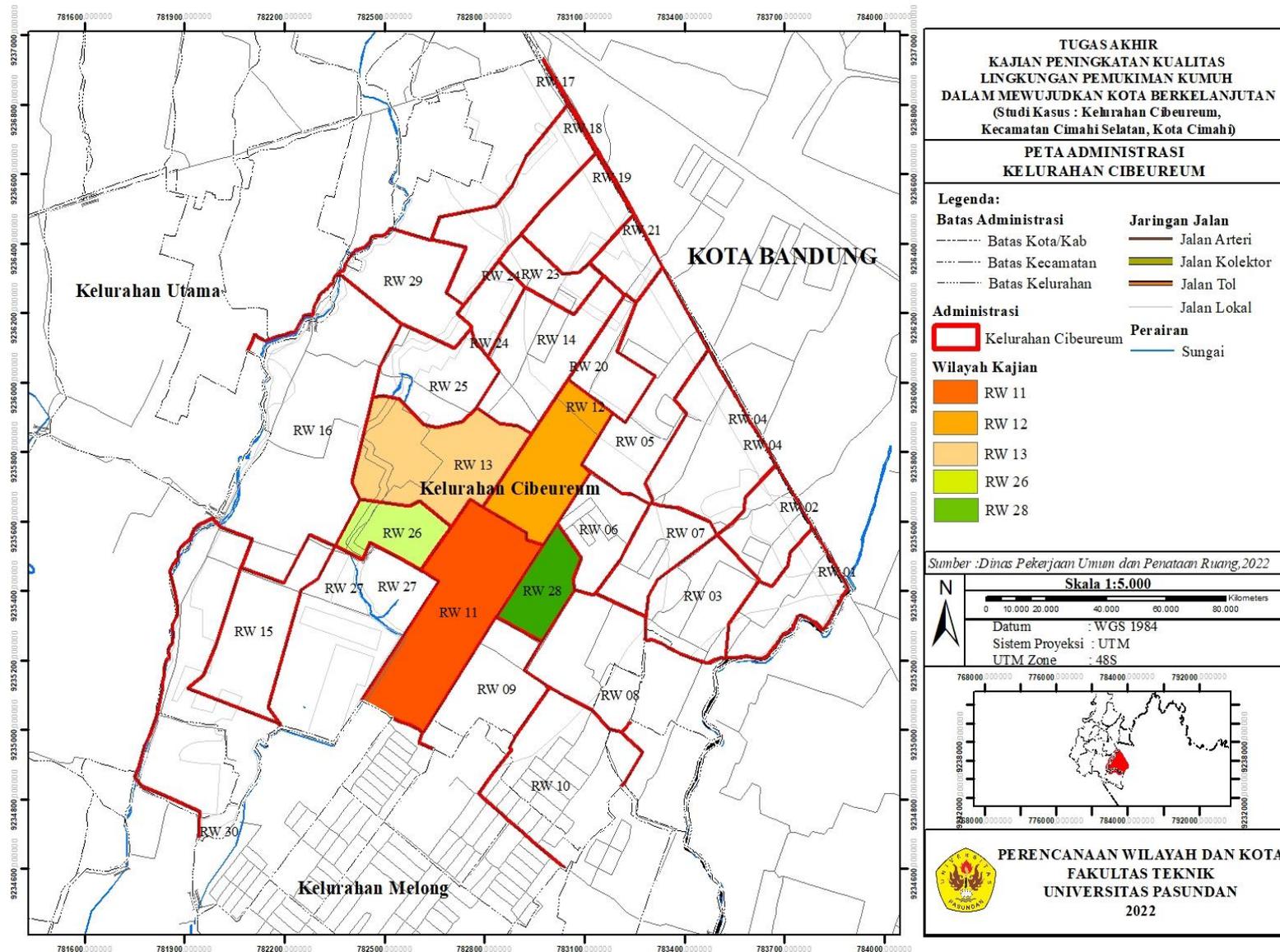
Kelurahan Cibeureum terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) RW, dimana permukiman wilayah kumuh terletak pada Kawasan Rancabentang meliputi 5 (lima) RW dari 29 RW yang ada di Kelurahan Cibeureum diantaranya RW 11,12,13,26, dan RW 28 dengan luas 22,4 Ha. Jumlah penduduk yang berdomisili di permukiman kumuh Rancabentang adalah 12.238 jiwa. Tipologi permukiman kumuh Rancabentang adalah permukiman kumuh di dataran rendah dengan karakteristik permukiman di Sekitar Industri.

Tabel I. 2 Luas Wilayah Penelitian

No	Wilayah Penelitian	Luas (Ha)
1	RW 11	5,16
2	RW 12	4,84
3	RW 13	5,44
4	RW 26	3,64
5	RW 28	3,13
Jumlah		22,22

Sumber : SK Walikota Tahun 2015, dan divalidasi Tahun 2022





Gambar I. 2 Peta Administrasi Kelurahan Cibeureum

1.5 Batasan Studi

Batasan penelitian ini dapat dilihat dari batasan wilayah dan batasan materi sebagai berikut.

A. Batasan Wilayah

Fokus wilayah kajian penelitian ini adalah kawasan permukiman kumuh, sehingga yang dikaji hanya berfokus pada wilayah permukiman kumuh di Kecamatan Cimahi Selatan disebutkan Kawasan Rancabentang Kelurahan Cibeureum berdasarkan Berdasarkan SK Walikota Cimahi Nomor 653/Kep.68.PU/2015 tentang Lokasi Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Cimahi Tahun 2015.

B. Batasan Materi

Karakteristik fisik lingkungan serta sosial-ekonomi serta status keberlanjutan lingkungan di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan, untuk menganalisis tingkat kemumuhan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang hanya mempertimbangkan kondisi fisik, sedangkan untuk menganalisis status keberlanjutan mempertimbangkan kondisi fisik-lingkungan, sosial, dan ekonomi.

1.6 Metodologi Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, objektif, dan logis dengan mengendalikan atau tanpa mengendalikan berbagai aspek/variable yang terdapat dalam fenomena, kejadian, maupun fakta yang diteliti untuk dapat menjawab pertanyaan atau masalah yang diselidiki (Yusuf,2014:26).

Penjelasan metodologi dijelaskan berdasarkan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut.

1.6.1 Teridentifikasi karakteristik sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan, serta tingkat kekumuhan di Kawasan Rancabentang Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan.

Metodologi terbagi menjadi metode pendekatan, metode pengumpulan data dan metode analisis. Untuk sasaran 1, metodologinya dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif mencoba memberikan gambaran keadaan masa sekarang secara mendalam dan merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau coba menggambarkan fenomena secara detail. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan usaha sadar dan sistematis untuk memberikan jawaban terhadap suatu masalah dan/atau mendapatkan informasi lebih mendalam dan luas terhadap suatu fenomena dengan menggunakan tahap-tahap penelitian dengan pendekatan kuantitatif (A.Muri Yusuf.2014). Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk mengungkapkan gambaran secara perhitungan angka atau statistik yang kemudian dianalisis untuk merumuskan suatu kesimpulan.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan sasaran satu ini menggunakan dua metode, yang secara garis besar yaitu:

1. Pengumpulan Data Primer

a. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan dengan cara mengamati kondisi fisik yang meliputi kondisi bangunan, kondisi penggunaan prasarana, sarana, utilitas.

Tabel I. 3 Tabel Observasi Lapangan

Pengumpulan Data Primer	Poin Observasi
Observasi Lapangan	Kondisi bangunan
	Kondisi jalan lingkungan
	Kondisi drainase lingkungan
	Kondisi sistem pengelolaan persampahan
	Kondisi proteksi kebakaran

Sumber : Penelitian, 2022

b. Kuesioner

Kuesioner dilakukan dengan cara memberikan pernyataan tertulis yang di berikan kepada responden untuk dijawab dimana responden merupakan masyarakat yang berkepentingan. Dalam penelitian yang dikaji, data yang diperoleh dari hasil kuisisioner adalah untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat, pendidikan kesehatan masyarakat, kondisi prasarana yang digunakan saat ini di Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan.

Metode yang digunakan dalam kegiatan survey lapangan (kuisisioner) yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu :

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan data primer dengan kuisisioner adalah *Stratified Random Sampling* dimana pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional, dilakukan sampling ini apabila anggota populasinya heterogen (tidak sejenis). Responden dipilih secara acak berdasarkan strata yang sifatnya heterogen. Metode ini digunakan untuk pengumpulan data primer menggunakan kuisisioner dengan populasi responden merupakan

jumlah kepala keluarga di Kawasan Perumahan Kumuh di Kelurahan Cibereum Kecamatan Cimahi Selatan.

Adapun penentuan jumlah sampel dengan menggunakan perhitungan rumus *Isaac* dan *Michael* sebagai berikut:

$$s = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

λ^2 dengan dk = 1, taraf kesalahan bias 1%, 5%, 10%.

P = Q = 0,5. d = 0,05. s = jumlah sampel

Keterangan :

s : jumlah sampel

λ^2 : Chi kuadrat yang harganya tergantung derajat kebebasan dan tingkat kesalahan. Untuk derajat kebebasan 1 dan kesalahan 10% harga Chi Kuadrat = 2,706 (*Tabel Chi Kuadrat*)

N : jumlah populasi

P : Peluang benar (0,5)

Q : Peluang salah (0,5)

d : Perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi
Perbedaan bias 0,01; 0,05; dan 0,1

Maka dapat ditentukan jumlah sampel penelitian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} s &= \frac{1^2 \cdot 1.685 \cdot 0,5 \cdot 0,5}{0,05^2 (1.685 - 1) + 1^2 \cdot 0,5 \cdot 0,5} \\ s &= \frac{3.084,58}{18,67} \\ &= 165,21 \\ &= 165 \text{ (pembulatan)} \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan rumus *Isaac* dan *Michael* dengan tingkat eror 10%, dengan jumlah unit bangunan di permukiman kumuh Kelurahan Cibereum 1.685 unit, sehingga jumlah sampel sebanyak 165, dimana dalam penelitian ini 1 unit bangunan diasumsikan 1 KK.

Metode *stratified random sampling* adalah teknik pengambilan sampel pada populasi yang heterogen dan berstrata dengan mengambil sampel dari

tiap-tiap sub populasi yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota dari masing-masing sub populasi secara acak atau serampangan, dimana strata dalam penelitian ini adalah masyarakat status non-kontrakan, dan masyarakat status kontrakan, karena berdasarkan isu yang ditemukan bahwa status penghuni dari rumah tinggal yang berada di kawasan kumuh adalah penyewa rumah 94% rumah sewa dan 6% hak milik.

Metode alokasi ukuran sampel untuk strata yang berbeda dengan menggunakan ukuran sampel sama dari setiap strata, karena jumlah pasti rumah penyewa dan rumah hak milik tidak di permukiman kumuh tidak ada sehingga melakukan perhitungan metode alokasi ukuran sampel, dengan menggunakan perhitungan:

$$n_i = \frac{n}{k}$$

Dimana :

n_i = Jumlah sampel unit

n = Jumlah total sampel

k = Jumlah strata

Sehingga jumlah dari setiap strata yaitu masyarakat status non-kontrakan sebanyak 83 sampel, dan masyarakat status kontrakan sebanyak 83 sampel.

Tabel I. 4 Matriks Kuisisioner Sasaran 1 dan 2

Topik Kuisisioner	Metode	Alat	Narasumber
• Kondisi fisik	<p><i>Stratified Random Sampling</i> → perhitungan rumus <i>Isaac dan Michael</i> → 165 sampel → status non-kontrakan 83 sampel → dan masyarakat status kontrakan 83 sampel.</p>	<p><i>Form</i> Kuisisioner</p>	<p>Masyarakat yang tinggal permukiman kumuh di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan</p>

Sumber : Penelitian, 2022

Kriteria narasumber yang diperlukan peneliti yaitu narasumber yang dapat menjawab, mengetahui, dan dianggap mengerti tentang permukiman kumuh di Kelurahan Cibeureum. Berikut ini hal-hal yang dipertimbangkan dalam kriteria narasumber:

Tabel I. 5 Kriteria Narasumber

Metode	Narasumber	Kriteria
Kuisisioner	Masyarakat kondisi permukiman kumuh di Kelurahan Cibeureum	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Keluarga (Laki-laki/Perempuan) • Tinggal minimal 1 tahun di Kelurahan Cibeureum • Mengetahui kondisi fisik di Kelurahan Cibeureum • Mengetahui kondisi sosial di Kelurahan Cibeureum • Mengetahui kondisi ekonomi (Skala Rumah Tangga)

Sumber : Rumusan Peneliti, Tahun 2022

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu dibuat untuk mendapatkan kondisi eksisting permukiman yang ada di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan dan juga dapat menjadi bukti faktual terkait gambaran daerah kajian diantaranya:

Tabel I. 6 Objek Obsevasi

Pengumpulan Data Primer	Poin Observasi
Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi bangunan; • Kondisi jalan lingkungan; • Kondisi akses air minum; • Kondisi drainase; • Kondisi pengelolaan air limbah; • Kondisi pengelolaan sampah; • Ketersediaan proteksi kebakaran.

Sumber : Penelitian, 2022

2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder merupakan pengambilan data yang di peroleh dari sumber-sumber lain yang dapat mendukung data-data yang diperoleh dari data primer yang di dapat dari buku-buku, instansi atau sumber lain yang berkaitan dengan studi yang di kaji. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian yang akan dikaji dapat diperoleh dari beberapa instansi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I. 7 Checklist Data Sekunder Sasaran 1

No	Data yang Dibutuhkan	Bentuk Data	Lokasi	Instansi
1	Data Perencanaan <ul style="list-style-type: none"> • RTRW Kota Cimahi Tahun 2012-2032 • SHP guna lahan eksisting tahun 2021 • SHP pola ruang tahun 2021 • SHP kawasan permukiman kumuh tahun 2021 	Dokumen dan SHP	Jalan Raden Demang Harjakusumah, Komp. Perkantoran Pemkot Cimahi Gd. C Lt. 1, Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40153	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi
2	Status kepemilikan lahan (jenis hak atas tanah) tahun 2021	Dokumen dan SHP	Jl. Encep Kartawiria No.21A, Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40512	Badan Pertanahan Kota Cimahi
3	Jumlah penduduk Kecamatan Cimahi Selatan (Per RW) tahun 2020	Dokumen	Jl. Jend. H. Amir Machmud No.125, Cibeureum, Kec. Cimahi Sel., Kota Cimahi, Jawa Barat 40535	Kantor Kelurahan Cibeureum

Sumber : Penelitian, Tahun 2022

C. Metode Analisis

1. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Analisis ini merupakan metode analisis dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, atau menggambarkan fenomena yang terjadi. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka sehingga memberikan suatu kesan lebih mudah ditangkap maknanya oleh siapapun yang membutuhkan informasi tentang keberadaan gejala tersebut.

Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh di lokus kajian, dengan melihat karakteristik sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan, dengan menginterpretasikan data-data yang ada sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi fisik lingkungan, ekonomi dan sosial yang tengah terjadi di lapangan

2. Penentuan Tingkat Kekumuhan

Tahapan ini merupakan tahapan untuk menilai lokasi permukiman kumuh berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang mempertimbangkan kondisi fisik. Dengan tujuan untuk mendapatkan klasifikasi tingkat kekumuhan dan daftar urutan (rangking) permukiman kumuh berdasarkan hasil penilaian terhadap kompleksitas permasalahan sebagai landasan penetapan strategi dan pola penanganan. Tahap ini akan menjadi saringan awal penilaian lokasi permukiman kumuh berdasarkan kompleksitas permasalahan yang ada di lokasi permukiman kumuh yang telah teridentifikasi pada tahap sebelumnya. Penilaian lokasi dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi terhadap aspek:

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:

- a. Kumuh berat bila memiliki nilai 60-80;
- b. Kumuh sedang bila memiliki nilai 38-59;
- c. Kumuh ringan bila memiliki nilai 16-37;



Tabel I. 8 Kriteria dan Indikator Penentuan Tingkat Kekumuhan

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RTDR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona dan/atau • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan dan wajah jalan 	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Format Isian, Observasi
			51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
			25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • KDB melebihi ketentuan RDTR dan/ atau RTBL • KLB melebihi ketentuan RDTR dan RTBL • Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi yaitu: • Untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha 	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5	Format Isian, Observasi
			51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		<ul style="list-style-type: none"> Untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha 	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan : <ul style="list-style-type: none"> Pengendalian dampak lingkungan Pembangunan bangunan gedung diatas dan/atau dibawah tanah, air dan/atau prasarana/ sarana umum Keselamatan bangunan gedung Kesehatan bangunan gedung Kenyamanan bangunan gedung Kemudahan bangunan gedung 	76%- 100% bangunan pada lokasi tidak meemenuhi persyaratan teknis	5	Format Isian, Observasi
			51% -75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
			25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	76%- 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	Format Isian, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA	
	lingkungan perumahan atau permukiman		51% -75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3		
			25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1		
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	76%- 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5		Format Isian, Observasi
			51% -75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3		
			25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1		
	3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki	76%- 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman		5

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		kualitas tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa	51% -75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	
			25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	
	b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	76%- 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	
			51% -75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3	
			25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	76%- 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5	Format Isian, Observasi
			51% -75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3	
			25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1	
	b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan	76%- 100% area terjadi genangan >30cm, >2 jam dan > 2 x setahun	5	Format Isian, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	air hujan sehingga menimbulkan genangan	genangan dengan tinggi lebih dari 30cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	51% -75% area terjadi genangan >30cm, >2 jam dan > 2 x setahun	3	
			25% - 50% area terjadi genangan >30cm, >2 jam dan > 2 x setahun	1	
	c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kualitas kontruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	76%- 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5	
			51% -75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3	
			25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	76%- 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	Format Isian, Observasi
			51% -75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3	
			25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1	
	b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana <ul style="list-style-type: none"> • kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik • tidak tersedianya sistem pengelohan limbah setempat atau terpusat 	76%- 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5	Format Isian, Observasi
			51% -75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai	1	
6. KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH	a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga • tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan 	76%- 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Format Isian, Observasi
			51% -75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
			25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	<p>Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pewadahan dan pemilahan domestik • pengumpulan lingkungan • pengangkutan lingkungan • pengelohan lingkungan 	76%- 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	Format Isian, Observasi
			51% -75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3	
			25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1	
7.KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	<p>Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pasokan air • jalan lingkungan • sarana komunikasih dan • data sistem proteksi kebakaran lingkungan 	76%- 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	Format Isian, Observasi
			51% -75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3	
			25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • alat pemadam api ringan (APAR) • kendaraan pemadam kebakaran dan • mobil tangga sesuai kebutuhan 	76%- 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	Format Isian, Observasi
			51% -75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3	
			25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1	

Sumber: Peraturan Menteri No 2 Tahun 2016

1.6.2 Teridentifikasinya status permukiman berkelanjutan di Kelurahan Cibereum Kecamatan Cimahi Selatan.

Metodologi terbagi menjadi metode pendekatan, metode pengumpulan data dan metode analisis. Untuk sasaran 2, metodologinya dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif mencoba memberikan gambaran keadaan masa sekarang secara mendalam dan merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau coba menggambarkan fenomena secara detail. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan usaha sadar dan sistematis untuk memberikan jawaban terhadap suatu masalah dan/atau mendapatkan informasi lebih mendalam dan luas terhadap suatu fenomena dengan menggunakan tahap-tahap penelitian dengan pendekatan kuantitatif (A.Muri Yusuf, 2014). Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk mengungkapkan gambaran secara perhitungan angka atau statistik yang kemudian dianalisis untuk merumuskan suatu kesimpulan.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan sasaran kedua ini menggunakan satu metode, yang secara garis besar yaitu:

1. Pengumpulan Data Primer

a. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan dengan cara mengamati kondisi fisik, sosial, dan ekonomi yang meliputi kondisi bangunan, kondisi penggunaan prasarana, sarana, utilitas, dan sebagainya.

b. Kuesioner

Kuesioner dilakukan dengan cara memberikan pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawab dimana responden merupakan masyarakat yang berkepentingan. Dalam penelitian yang dikaji, data yang

diperoleh dari hasil kuisioner adalah untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat, pendidikan kesehatan masyarakat, kondisi prasarana yang digunakan saat ini di Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan data primer dengan kuisioner adalah *Stratified Random Sampling* dimana pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional, dilakukan sampling ini apabila anggota populasinya heterogen (tidak sejenis), lalu melakukan perhitungan rumus *Isaac* dan *Michael* sehingga mendapatkan hasil 165 sampel, dan menggunakan metode alokasi ukuran sampel sehingga status non-kontrakan 83 sampel dan masyarakat status kontrakan 83 sampel

C. Metode Analisis

1. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Analisis ini merupakan metode analisis dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, atau menggambarkan fenomena yang terjadi. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka sehingga memberikan suatu kesan lebih mudah ditangkap maknanya oleh siapapun yang membutuhkan informasi tentang keberadaan gejala tersebut.

2. Analisis Spasial

Analisis spasial adalah teknik ataupun proses yang melibatkan beberapa atau sejumlah fungsi perhitungan serta evaluasi logika matematis yang dapat dilakukan pada data spasial, dalam rangka untuk memperoleh nilai tambah, ekstraksi serta informasi baru yang beraspek spasial. *Buffering*, adalah fungsi yang akan menghasilkan layer spasial baru menghasilkan layer data spasial baru dengan bentuk poligon serta memiliki jarak tertentu dari unsur – unsur spasial yang menjadi masukannya.

Tabel I. 9 Analisis Keterjangkauan Fasilitas Publik

Variabel Operasioanal	Jenis Sarana	Radius Pencapaian	Sumber
Ketersediaan ruang terbuka publik berupa taman lingkungan (RTH) atau lapangan olahraga (RTNH)	Olahraga	1.000 m	<i>SNI 03-1733 2004, tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan</i>
Ketersediaan sarana kesehatan skala lingkungan (posyandu/balai pengobatan)	Posyandu dan Klinik	1.000 m	
Ketersediaan sarana pendidikan dasar (TK dan atau SD) di dalam area perumahan/kampung	SD	1.000 m	
Ketersediaan transportasi publik (jarak terhadap tempat yang memungkinkan untuk naik-turun penumpang angkutan umum kota, halte bis atau terminal angkutan umum terdekat)	Halte	500 m	

Sumber : Penelitian, 2022

3. Penentuan Status Keberlanjutan Permukiman

Tujuan ke 11 dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah diinisiasi oleh Sekretariat SDGs/Bappenas Indonesia adalah kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan, dimana target 2030 adalah memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua, meningkatkan mutu permukiman kumuh. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan inklusif, semua masyarakat memiliki hak atas kota, terutama dalam persoalan permukiman sebagai salah satu kebutuhan primer yang perlu ditangi dan didahulukan. Masyarakat kota termasuk penghuni permukiman kumuh kota memiliki hak yang sama untuk merasakan kehidupan yang layak, pemerataan pelayanan dan penyediaan infrastruktur dasar, serta lingkungan hunian yang terjangkau dan sehat. Sehingga perlu melihat status keberlanjutan permukiman pada permukiman kumuh.

Dalam menentukan status keberlanjutan berbeda dengan menentukan tingkat kekumuhan dimana dalam menentukan status keberlanjutan mempertimbangkan kondisi fisik-lingkungan, ekonomi, dan sosial. Hasil kajian terhadap aspek sosial ekonomi, aspek fisik lingkungan dan aspek lainnya (institusional) dapat dilihat atau dianalisis lebih lanjut dalam

kerangka keberlanjutan kampung kota sebagaimana telah dijelaskan dalam variabel operasional yang merupakan sintesis dari indikator permukiman yang inklusif dan berkelanjutan. dalam penelitian ini. Masing-masing karakteristik fisik dan sosial ekonomi kemudian dikategorikan dalam tiga rentang nilai yaitu kategori ‘tinggi’ dengan nilai 5, kategori ‘sedang’ dengan nilai 3 dan kategori rendah dengan nilai 1.

Variabel dalam aspek fisik lingkungan yang dipertimbangkan dalam analisis status keberlanjutan, diantaranya:

1. Kepadatan Bangunan
2. Keteraturan Bangunan
3. Kondisi Bangunan
4. Ketersediaan dan Kondisi Jaringan Jalan
5. Akses terhadap air bersih
6. Akses terhadap MCK (sanitasi)
7. Akses terhadap sarana, prasarana dan jaringan persampahan
8. Ketersediaan dan Kondisi Kondisi Jaringan Drainase
9. Akses terhadap fasos-fasum
10. Kualitas dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik
11. Ketersediaan saranaprasarana proteksi kebakaran
12. Ketersediaan jaringan evakuasi bencana

Variabel dalam aspek sosial yang dipertimbangkan dalam analisis status keberlanjutan, diantaranya:

1. Kepadatan Penduduk
2. Tingkat pendidikan
3. Tingkat partisipasi masyarakat
4. Persepsi masyarakat terhadap kondisi lingkungan hunian

Variabel dalam aspek ekonomi yang dipertimbangkan dalam analisis status keberlanjutan, diantaranya:

1. Mata Pencaharian penduduk dan tingkat pengangguran
2. Tingkat pendapatan dan kesejahteraan penduduk

3. Kepemilikan kendaraan pribadi
4. Adanya kegiatan ekonomi (produktif) yang dilakukan di dalam rumah

Variabel dalam aspek ekonomi yang dipertimbangkan dalam analisis status keberlanjutan, diantaranya:

1. Legalitas lahan/rumah
2. Peran komunitas
3. Bantuan Pemerintah



Tabel I. 10 Matriks Kriteria, Variabel, dan Indikator Permukiman Berkelanjutan

Aspek	Variabel Konseptual	Variabel operasional	Indikator	Sumber Data
Aspek Fisik	Kepadatan Bangunan Gedung	Kepadatan netto bangunan (rumah), dihitung melalui perbandingan jumlah bangunan rumah dan luas lahan kawasan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan rendah: <50 unit/Ha (Skor 5) • Kepadatan sedang: 50-100 unit/Ha (Skor 3) • Kepadatan tinggi: > 100 unit/Ha (Skor 1) 	Data Primer (kuesioner)
	Keteraturan Bangunan	Jumlah bangunan rumah yang memenuhi ketentuan tata bangunan yang diatur dalam RDTR atau RTBL (KDB, KLB, KDH)	Proporsi (%) bangunan rumah yang memenuhi ketentuan tata bangunan: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kesesuaian tata masa bangunan tinggi: >75% rumah (Skor 5) • Tingkat kesesuaian tata masa bangunan sedang: 50%-75% rumah (Skor 3) • Tingkat kesesuaian tata masa bangunan rendah: <50% rumah (Skor 1) 	Data Primer (observasi)
		Jumlah bangunan rumah yang memiliki unsur keteraturan bangunan	Proporsi (%) bangunan rumah yang memenuhi unsur keteraturan bangunan: (dilihat dari jarak antar bangunan, tata letak bangunan teratur/tidak) <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat keteraturan: >75% rumah (Skor 5) • Tingkat keteraturan sedang: 50%-75% rumah (Skor 3) • Tingkat keteraturan rendah: <50% rumah (Skor 1) 	Data Primer (observasi)

Aspek	Variabel Konseptual	Variabel operasional	Indikator	Sumber Data
	Kondisi Bangunan	Kondisi bangunan rumah dilihat dari luas bangunan, bahan bangunan (permanen, semi permanen, tidak permanen), kondisi pencahayaan rumah, ketersediaan ventilasi udara, kerusakan bangunan (kondisi tembok/atap/lantai)	<p>Proporsi (%) bangunan rumah yang memiliki kondisi bangunan dalam kondisi baik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi baik: >75% bangunan/rumah (Skor 5) • Kondisi sedang: 50%-75% bangunan/rumah (Skor 3) • Kondisi buruk: <50% bangunan/rumah (Skor 1) 	Data Primer (observasi)
	Ketersediaan dan Kondisi Jaringan Jalan	Lokasi rumah/perumahan terlayani dengan jalan lingkungan sesuai dengan ketentuan teknis	<p>Proporsi (%) rumah yang terlayani oleh jaringan jalan lingkungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akses jalan baik: >75% KK (Skor 5) • Akses jalan cukup: 50%-75% KK (Skor 3) • Akses jalan buruk: <50% KK (Skor 1) 	Data Primer (observasi)
		Kondisi jalan lingkungan yang terdapat di kawasan perumahan (rusak seluruhnya, rusak sebagian, atau tidak ada jalan yang rusak)	<p>Proporsi (%) rumah tangga (KK) yang menyatakan kualitas jalan baik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas jalan baik: 76%-100% KK (Skor 5) • Kualitas jalan cukup: 50%-75% KK (Skor 3) • Kualitas jalan buruk: <50% KK (Skor 1) 	Data Primer (kuesioner)
	Akses terhadap air bersih	Jumlah masyarakat yang dapat mengakses air minum dengan kualitas baik (tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa)	<p>Proporsi (%) rumah tangga (KK) yang dapat mengakses air minum sehat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akses air minum baik: >75% KK (Skor 5) • Akses air minum cukup: 50%-75% KK (Skor 3) 	Data Primer (kuesioner)

Aspek	Variabel Konseptual	Variabel operasional	Indikator	Sumber Data
			<ul style="list-style-type: none"> Akses air minum kurang: <50% KK (Skor 1) 	
		Jumlah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari.	<p>Proporsi (%) rumah tangga (KK) yang menyatakan mampu memenuhi kebutuhan air bersih harian (minum, mandi, memasak, dsb).</p> <ul style="list-style-type: none"> Akses air bersih baik: >75% KK (Skor 5) Akses air bersih cukup: 50%-75% KK (Skor 3) Akses air bersih kurang: <50% KK (Skor 1) 	Data Primer (kuesioner)
	Akses terhadap MCK (sanitasi)	Jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap MCK pribadi atau MCK komunal	<p>Proporsi (%) rumah tangga (KK) yang memiliki akses terhadap MCK:</p> <ul style="list-style-type: none"> Akses sanitasi baik: >75% KK (Skor 5) Akses sanitasi cukup: 50%-75% KK (Skor 3) Akses sanitasi kurang: <50% KK (Skor 1) 	Data Primer (kuesioner)
	Akses terhadap sarana, prasaranan dan jaringan persampahan	<p>Pengumpulan Ketersediaan tempat sampah pribadi di dalam rumah (jika tidak, apakah sampah dibuang sembarangan atau di bak sampah/TPS terdekat)</p>	<p>Proporsi (%) rumah tangga (KK) yang terlayani atau memiliki akses terhadap sarana-prasarana persampahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Akses sarana persampahan baik: >75% KK (Skor 5) Akses sarana persampahan sedang: : 50%-75% KK(Skor 3) Akses sarana persampahan kurang: <50% KK (Skor 1) 	Data Primer (kuesioner)
		Pengangkutan	<p>Proporsi (%) rumah tangga (KK) yang menyatakan sistem pengelolaan/pengangkutan sampah baik (rutin, teratur, tidak terjadi penumpukan sampah):</p>	Data Primer (kuesioner)

Aspek	Variabel Konseptual	Variabel operasional	Indikator	Sumber Data
		Frekuensi sampah diangkut oleh petugas kebersihan setemat/ truk/ kendaraan pengangkut sampah	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pengelolaan sampah baik: >75% KK (Skor 5) • Sistem pengelolaan sampah sedang: : 50%-75% KK (Skor 3) • Sistem pengelolaan sampah kurang: <50% KK (Skor 1) 	
	Ketersediaan dan Kondisi Jaringan Drainase	Ketersediaan saluran drainase di sekitar lingkungan perumahan	<p>Proporsi (%) rumah tangga (KK) yang terlayani saluran drainase di depan rumahnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan drainase baik: 76%-100% KK (Skor 5) • Ketersediaan drainase cukup: %-75% KK (Skor 3) • Ketersediaan drainase kurang: <50% KK (Skor 1) 	Data Primer (kuesioner + observasi)
		Kemampuan drainase dalam mengalirkan limpasan air (dilihat dari genangan air dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun)	<p>Proporsi (%) rumah tangga (KK) yang menyatakan pernah mengalami genangan air pada saluran drainase di depan rumahnya (>30 cm, > 2 jam, > 2x setahun):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan drainase baik: <50% KK (Skor 5) • Kemampuan drainase sedang: 50%-75% KK (Skor 3) • Ketersediaan drainase buruk: 76%-100% KK (Skor 1) 	Data Primer (kuesioner)
		Kondisi (kualitas) saluran drainase (kotor/bersih, banyak sampah/tidak, berbau/tidak)	<p>Proporsi (%) rumah tangga (KK) yang menyatakan kondisi drainase dalam kondisi baik (bersih, tidak berbau, tidak ada sampah):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan drainase baik: >75% KK (Skor 5) • Kemampuan drainase sedang: 50%-75% KK (Skor 3) • Ketersediaan drainase buruk: <50% KK (Skor 1) 	Data Primer (kuesioner + observasi)

Aspek	Variabel Konseptual	Variabel operasional	Indikator	Sumber Data
	Akses terhadap fasos-fasum di sekitar kawasan perumahan/kampung	Ketersediaan ruang terbuka publik berupa taman lingkungan (RTH) atau lapangan olahraga (RTNH)	<ul style="list-style-type: none"> Akses terhadap ruang terbuka publik baik: berupa taman lingkungan (RTH) atau lapangan olahraga (RTNH) 1 km dari kawasan perumahan/kampung (Skor 5) Akses terhadap ruang terbuka publik kurang: tidak terdapat ruang terbuka publik berupa taman lingkungan (RTH) atau lapangan olahraga (RTNH) 1 km dari kawasan perumahan/kampung (Skor 1) 	Data Primer (observasi) + Data Sekunder (Analisis spasial)
		Ketersediaan sarana kesehatan skala lingkungan (posyandu/balai pengobatan) di dalam area perumahan/kampung atau dalam radius 500-1000 meter dari kawasan	<ul style="list-style-type: none"> Akses terhadap sarana kesehatan baik: terdapat posyandu/balai pengobatan dalam radius maksimal 1 km dari kawasan perumahan/kampung (Skor 5) Akses terhadap sarana kesehatan kurang: tidak terdapat posyandu/balai pengobatan dalam radius maksimal 1 km dari kawasan perumahan/kampung (Skor 1) 	Data Primer (observasi) + Data Sekunder (Analisis spasial)
		Ketersediaan sarana pendidikan dasar (TK dan atau SD) di dalam area perumahan/kampung atau dalam radius 500-1000 meter dari kawasan	<ul style="list-style-type: none"> Akses terhadap sarana pendidikan dasar baik: terdapat playgroup/TK/SD dalam radius maksimal 1 km dari kawasan perumahan/kampung (Skor 5) Akses terhadap sarana pendidikan dasar kurang: tidak terdapat playgroup/TK/SD dalam radius maksimal 1 km dari kawasan perumahan/kampung (Skor 1) 	Data Primer (observasi) + Data Sekunder (Analisis spasial)

Aspek	Variabel Konseptual	Variabel operasional	Indikator	Sumber Data
		Ketersediaan transportasi publik (jarak terhadap tempat yang memungkinkan untuk naik-turun penumpang angkutan umum kota, halte bis atau terminal angkutan umum terdekat)	<ul style="list-style-type: none"> Akses terhadap transportasi publik baik: terdapat jalur angkutan umum, halte bis, atau terminal radius 500 meter dari kawasan perumahan/kampung (Skor 5) Akses terhadap transportasi publik kurang: tidak terdapat jalur angkutan umum, halte bis, atau terminal radius 500 meter dari kawasan perumahan/kampung (Skor 1) 	Data Primer (observasi) + Data Sekunder (Analisis spasial)
	Kualitas dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik (Jika ada)	Kualitas ruang terbuka publik berdasarkan persepsi pengguna (warga sekitar)	Proporsi (%) rumah tangga (KK) yang menyatakan ruang terbuka publik (taman / lapangan olahraga) memiliki kualitas baik (kebersihan, kenyamanan dan kelengkapan fasilitas): <ul style="list-style-type: none"> Kualitas ruang terbuka publik baik: >75% KK (Skor 5) Kualitas ruang terbuka publik cukup: 50%-75% KK (Skor 3) Kualitas terhadap ruang terbuka publik kurang: <50% KK (Skor 1) 	Data Primer (kuesioner)
		Tingkat penggunaan (pemanfaatan) ruang terbuka publik oleh masyarakat Tujuan/motivasi kunjungan masyarakat ke ruang terbuka publik	Proporsi (%) rumah tangga (KK) yang memanfaatkan fungsi/keberadaan ruang terbuka publik untuk aktifitas sehari hari (bersantai, mengobrol, berjualan, olahraga, dsb) sekurang-kurangnya 1x kunjungan dalam 1 minggu. <ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan ruang terbuka publik baik: >75% KK (Skor 5) Pemanfaatan ruang terbuka publik cukup: 50%-75% KK (Skor 3) 	Data Primer (kuesioner)

Aspek	Variabel Konseptual	Variabel operasional	Indikator	Sumber Data
			<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan ruang terbuka publik kurang: < 50% (Skor 1) 	
	Ketersediaan sarana prasarana proteksi kebakaran	Ketersediaan sarana pemadam kebakaran berupa alat pemadam api ringan atau <i>hydrant</i> di kawasan perumahan/kampung	<ul style="list-style-type: none"> Proteksi terhadap sarana kebakaran baik: Kawasan perumahan (kampung/RW) memiliki sarana pemadam kebakaran (Skor 5) Proteksi terhadap sarana kebakaran buruk: Kawasan perumahan (kampung/RW) tidak memiliki sarana pemadam kebakaran (Skor 1) 	Data Primer (observasi + wawancara RW)
		Ketersediaan prasarana pemadam kebakaran berupa jalan lingkungan yang dapat dilalui mobil pemadam, serta ketersediaan air di kawasan perumahan/kampung	<ul style="list-style-type: none"> Proteksi terhadap prasarana kebakaran baik: Kawasan perumahan (kampung/RW) memiliki prasaranapemadam kebakaran (Skor 5) Proteksi terhadap prasarana kebakaran buruk: Kawasan perumahan (kampung/RW) tidak memiliki prasarana pemadam kebakaran (Skor 1) 	
	Ketersediaan jaringan evakuasi bencana	Ketersediaan rute (jalur) evakuasi bencana disertai dengan rambu/papan penunjuk	<ul style="list-style-type: none"> Ketersedian jaringan evakuasi bencana baik: kawasan perumahan (kampung/RW) memiliki rute (jalur), rambu dan ruang evakuasi bencana (Skor 5) 	Data Primer (observasi + wawancara RW)
		Ketersediaan ruang evakuasi bencana sementara (posko bencana/lapangan/ /ruang darurat lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> Ketersedian jaringan evakuasi bencana buruk: kawasan perumahan (kampung/RW) tidak memiliki rute (jalur), rambu dan ruang evakuasi bencana (Skor 1) 	
		Pengetahuan masyarakat tentang rute dan ruang evakuasi bencana	Proporsi (%) rumah tangga (KK) yang mengetahui arah rute/jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana:	Data Primer (kuesioner)

Aspek	Variabel Konseptual	Variabel operasional	Indikator	Sumber Data
			<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan masyarakat terhadap evakuasi bencana baik: >75% KK (Skor 5) • Pengetahuan masyarakat terhadap evakuasi bencana cukup: 50%-75% KK (Skor 3) • Pengetahuan masyarakat terhadap evakuasi bencana kurang: <50% KK (Skor 1) 	
Aspek Sosial	Kepadatan Penduduk	Kepadatan penduduk netto, dihitung melalui perbandingan jumlah penduduk dan luas lahan kawasan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan penduduk netto rendah: <200 jiwa/Ha (Skor 5) • Kepadatan penduduk netto sedang: 201-300 jiwa/Ha (Skor 3) • Kepadatan penduduk netto tinggi >300 jiwa/Ha (Skor 1) 	Data Sekunder (Data Statistik)
	Tingkat pendidikan	Tingkat pendidikan terakhir yang berhasil diselesaikan/dicapai oleh responden	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendidikan masyarakat baik: > 67 % responden lulusan perguruan tinggi (S1/D) atau Sekolah Menengah (SMA/SMK) (Skor 5) • Tingkat pendidikan masyarakat menengah: 33%-67% responden lulusan perguruan tinggi (D3/S1/lebih tinggi) atau Sekolah Menengah (SMA/SMK) (Skor 3) • Tingkat pendidikan masyarakat rendah: <33% responden lulusan perguruan tinggi (D3/S1/lebih tinggi) atau Sekolah Menengah (SMA/SMK) (Skor 1) 	Data Primer (kuesioner)
	Tingkat partisipasi	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan		Data Primer

Aspek	Variabel Konseptual	Variabel operasional	Indikator	Sumber Data	
	masyarakat	kerja bakt	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat partisipasi baik: >67%KK menyatakan sering berpartisipasi dalam kegiatan sosial (Skor 5) Tingkat partisipasi sedang: 33%-67% KK menyatakan sering berpartisipasi dalam kegiatan sosial (Skor 3) Tingkat partisipasi rendah: <33% menyatakan sering berpartisipasi dalam kegiatan sosial (Skor 1) 	(kuesioner)	
		Partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa			
		Partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga bersama			
		Partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (pengajian, acara hari raya)			
		Partisipasi masyarakat dalam kegiatan keamanan lingkungan (siskamling)			
	Persepsi masyarakat terhadap kondisi lingkungan hunian (kampung)	Tingkat kebersihan lingkungan	Tingkat kebersihan/kenyamanan/keindahan lingkungan: <ul style="list-style-type: none"> Baik: > 67% KK menyatakan baik (Skor 5) Sedang: 33%-67% KK menyatakan baik (Skor 3) Buruk: < 33% KK menyatakan baik (Skor 1) 	Data Primer (kuesioner)	
					Tingkat kenyamanan lingkungan
					Tingkat keindahan lingkungan
			Tingkat hubungan kedekatan dengan tetangga		Tingkat kedekatan dengan tetangga: <ul style="list-style-type: none"> Tinggi: > 67% KK menyatakan baik (Skor 5) Sedang: 33%-67% KK menyatakan baik (Skor 3) Rendah: < 33% KK menyatakan baik (Skor 1)
			Tingkat keamanan kawasan		Tingkat keamanan kawasan (dilihat dari kejadian/tindak kriminal):

Aspek	Variabel Konseptual	Variabel operasional	Indikator	Sumber Data
			<ul style="list-style-type: none"> • Baik: > 67% KK menyatakan aman dari tindak kriminal (Skor 5) • Sedang: 33%-67% KK menyatakan aman dari tindak kriminal (Skor 3) • Buruk: < 33% KK menyatakan aman dari tindak criminal (Skor 1) 	
		Tingkat kerawanan konflik sosial	<p>Tingkat kerawanan konflik sosial (dilihat dari pertengkaran/perselisihan/perkelahian antar warga setempat):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baik: > 67% KK menyatakan tidak pernah terjadi konflik sosial (Skor 5) • Sedang: 33%-67% KK menyatakan tidak pernah terjadi konflik sosial (Skor 3) • Buruk: < 33% KK menyatakan tidak pernah terjadi konflik sosial (Skor 1) 	
		Tingkat kepuasan masyarakat untuk tinggal di kampung	<p>Tingkat kepuasan masyarakat untuk tinggal di kampung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baik: > 67% KK menyatakan puas tinggal di kampung (Skor 5) • Sedang: 33%-67% KK menyatakan puas inggal di kampung (Skor 3) 	

Aspek	Variabel Konseptual	Variabel operasional	Indikator	Sumber Data
			<ul style="list-style-type: none"> Buruk: < 33% KK menyatakan puas tinggal di kampung (Skor 1) 	
Aspek Ekonomi	Mata Pencarian penduduk dan tingkat pengangguran	Jenis pekerjaan kepala keluarga (bekerja tetap, tidak tetap atau tidak bekerja)	<p>Tingkat pengangguran (dilihat dari status pekerjaan kepala keluarga):</p> <ul style="list-style-type: none"> Tinggi: > 67% kepala keluarga responden tidak memiliki pekerjaan (Skor 5) Sedang: 33%-67% kepala keluarga responden tidak memiliki pekerjaan (Skor 3) Rendah: < 33% kepala keluarga responden tidak memiliki pekerjaan (Skor 1) 	Data Primer (kuesioner)
	Tingkat pendapatan dan kesejahteraan penduduk	Besar pendapatan rata-rata bulanan	<p>Tingkat pendapatan (dilihat besar pendapatan dibandingkan UMR):</p> <ul style="list-style-type: none"> Tinggi: > 67% kepala keluarga memiliki gaji UMR kota (Skor 5) Sedang: 33%-67% kepala keluarga memiliki gaji UMR kota (Skor 3) Rendah: < 33% kepala keluarga memiliki gaji UMR kota (Skor 1) 	Data Primer (kuesioner)

Aspek	Variabel Konseptual	Variabel operasional	Indikator	Sumber Data
		Tingkat kecukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari	<p>Tingkat kesejahteraan (dilihat dari kecukupan pendapatan terhadap biaya hidup/kebutuhan sehari-hari/pengeluaran rutin keluarga):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tinggi: > 67% KK menyatakan bahwa pendapatan mencukupi (Skor 5) • Sedang: 33%-67% KK menyatakan bahwa pendapatan mencukupi (Skor 3) • Rendah: < 33% KK menyatakan bahwa pendapatan mencukupi (Skor 1) 	Data Primer (kuesioner)
	Kepemilikan kendaraan pribadi	Jumlah kendaraan bermotor pribadi yang dimiliki (kendaraan roda dua, roda empat atau jenis kendaraan lainnya)	<p>Tingkat kepemilikan kendaraan bermotor pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tinggi: > 67% KK memiliki kendaraan bermotor pribadi (Skor 5) • Sedang: 33%-67% KK memiliki kendaraan bermotor pribadi (Skor 3) • Rendah: < 33% KK memiliki kendaraan bermotor pribadi (Skor 1) 	Data Primer (kuesioner)
	Adanya kegiatan ekonomi (produktif) yang dilakukan di dalam rumah	Kegiatan ekonomi skala rumah tangga yang dilakukan di dalam rumah (berdagang, atau membuat suatu produk untuk dijual)	<p>Tingkat keberadaan kegiatan ekonomi skala rumah tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tinggi: > 67% KK memiliki kegiatan ekonomi dalam rumah (Skor 5) 	Data Primer (kuesioner)

Aspek	Variabel Konseptual	Variabel operasional	Indikator	Sumber Data
			<ul style="list-style-type: none"> • Sedang: 33%-67% KK memiliki kegiatan ekonomi dalam rumah (Skor 3) • Rendah: < 33% KK memiliki kegiatan ekonomi dalam rumah (Skor 1) 	
Aspek Lainnya	Legalitas lahan/rumah	Status kepemilikan rumah	<p>Status kepemilikan rumah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legalitas Tinggi: > 67% rumah memiliki status (SHM/HGB) (Skor 5) • Legalitas Sedang: > 33%-67% memiliki status (SHM/HGB) (Skor 3) • Legalitas Rendah: < 33% memiliki status (SHM/HGB) (Skor 1) 	Data Primer (kuesioner)
	Peran komunitas	Adanya komunitas (internal/eksternal) yang membantu pengembangan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan atau pembangunan infrastruktur kawasan	<p>Proporsi rumah tangga yang menyatakan menerima manfaat (baik skala individu, rumah tangga atau skala kawasan) dari keberadaan komunitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peran komunitas baik: > 67% KK menerima manfaat (Skor 5) • Peran komunitas cukup: 33%-67% KK menerima manfaat (Skor 3) • Peran komunitas kurang: <33% KK menerima manfaat (Skor 1) 	Data Primer (kuesioner)

Aspek	Variabel Konseptual	Variabel operasional	Indikator	Sumber Data
	Bantuan Pemerintah	Adanya bantuan/program pemerintah terkait peningkatan kualitas fisik lingkungan atau peningkatan ekonomi masyarakat	<p>Proporsi rumah tangga yang menyatakan pernah menerima bantuan atau program pemerintah (bantuan ekonomi, bantuan perbaikan rumah, bantuan perbaikan infrasktruktur kawasan sekitar rumah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cakupan program pemerintah baik: > 67% KK pernah menerima bantuan (Skor 5) • Cakupan program pemerintah cukup: 33%- 67% KK pernah menerima bantuan (Skor 3) • Cakupan program pemerintah kurang: <33% KK pernah menerima bantuan (Skor 1) 	Data Primer (kuesioner)

Sumber : I.Kustiwan, dan A.Ramadhan,2019

1.6.3 Terumuskannya arahan penangan permukiman kumuh Kawasan Rancabentang Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan dalam mewujudkan permukiman inklusif dan berkelanjutan.

Metodologi terbagi menjadi metode pendekatan, metode pengumpulan data dan metode analisis. Untuk sasaran 3, metodologinya dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif mencari makna, pemahaman, penegertian, *verstehen* tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan/atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, konstektual, dan menyeluruh. Peneliti bukan mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif, dan holistik (A.Muri Yusuf.2014). Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengungkapkan gambaran dengan memahami dan mengartikan suatu kondisi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri kemudian dianalisis untuk merumuskan suatu kesimpulan.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data yang di lakukan dalam penyusunan sasaran ketiga ini menggunakan dua metode, yang secara garis besar yaitu:

1. Pengumpulan Data Primer

a. Wawancara/Interview

Wawancara/interview dilakukan kepada responden yang dapat dianggap mengerti suatu permasalahan atau potensi yang akan ditanyakan pada wilayah kajian studi. Wawancara merupakan pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden atau pihak terkait. Dalam penelitian ini, wawancara berguna untuk mengetahui keterlibatan pemerintah dalam melakukan penanganan

permukiman kumuh untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.

Tabel I. 11 Matriks Wawancara

Topik Wawancara	Metode Wawancara	Alat Wawancara	Jumlah Narasumber	Narasumber
<ul style="list-style-type: none"> Rencana pemerintah dalam melakukan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Cibeureum. Potensi dan kendala yang dihadapi dalam penanganan permukiman kumuh. 	<i>Purposive Sampling</i>	Form Wawancara	1 (satu) narasumber	Dinas Perumahan dan Permukiman (Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)
Pemahaman, peran, serta kepedulian masyarakat terhadap permukiman yang sesuai dengan standar dan syarat kesehatan.	<i>Purposive Sampling</i>	Form Wawancara	5 (Lima)	Ketua,RW 11,RW 12,RW 13,RW 26,RW 28

Sumber : Penelitian, 2022

Kriteria narasumber yang diperlukan peneliti yaitu narasumber yang dapat menjawab, mengetahui, dan dianggap mengerti tentang permukiman kumuh di Kelurahan Cibeureum. Berikut ini hal-hal yang dipertimbangkan dalam kriteria narasumber:

Tabel I. 12 Kriteria Narasumber

Metode	Narasumber	Kriteria
Wawancara	Dinas Perumahan dan Permukiman (Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua atau anggota Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Laki-laki/Perempuan) • Bekerja minimal 1 tahun • Memiliki kompetensi dalam hal permukiman kumuh • Mengetahui kondisi permukiman kumuh di Kota Cimahi khususnya di Kelurahan Cibeureum • Mengetahui penanganan yang sedang atau yang akan dilakukan kedepannya.
	Ketua RW 11,RW 12,RW 13,RW 26,RW 28	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua RW (Laki-laki/Perempuan) • Tinggal minimal 1 tahun di Kelurahan Cibeureum • Mengetahui kondisi permukiman kumuh di Kelurahan Cibeureum • Mengetahui kondisi sosial masyarakat yang ada di permukiman kumuh di Kota Cimahi khususnya di Kelurahan Cibeureum

Sumber : Rumusan Peneliti, Tahun 2022

C. Metode Analisis

1. Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis potensi dan masalah yaitu dengan penjabaran dan penjelasan tentang potensi dan masalah yang terdapat di wilayah studi. Analisis ini dilakukan baik dengan melakukan pengamatan atau observasi, kuisisioner kepada penduduk di permukiman kumuh Kelurahan Cibeureum, form isian ataupun dengan wawancara kepada pejabat terkait. Analisis ini juga menjelaskan potensi dan masalah yang terdapat permukiman kumuh di Kelurahan Cibeureum,serta arahan yang dikeluarkan akan menjawab/disesuaikan dengan:

- Arahan menjawab nilai keberlanjutan kawasan permukiman rendah

- Arahan disesuaikan dengan standar Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/Prt/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.
- Pandangan *stakeholder* berdasarkan dari hasil wawancara tahun 2022 yang berkaitan dengan penanganan permukiman kumuh Kawasan Rancabentang Kelurahan Cibereum secara langsung



1.6.4 Matriks Analisis

Untuk mempermudah melakukan analisis dalam penelitian maka disusun matriks analisis sebagai berikut:

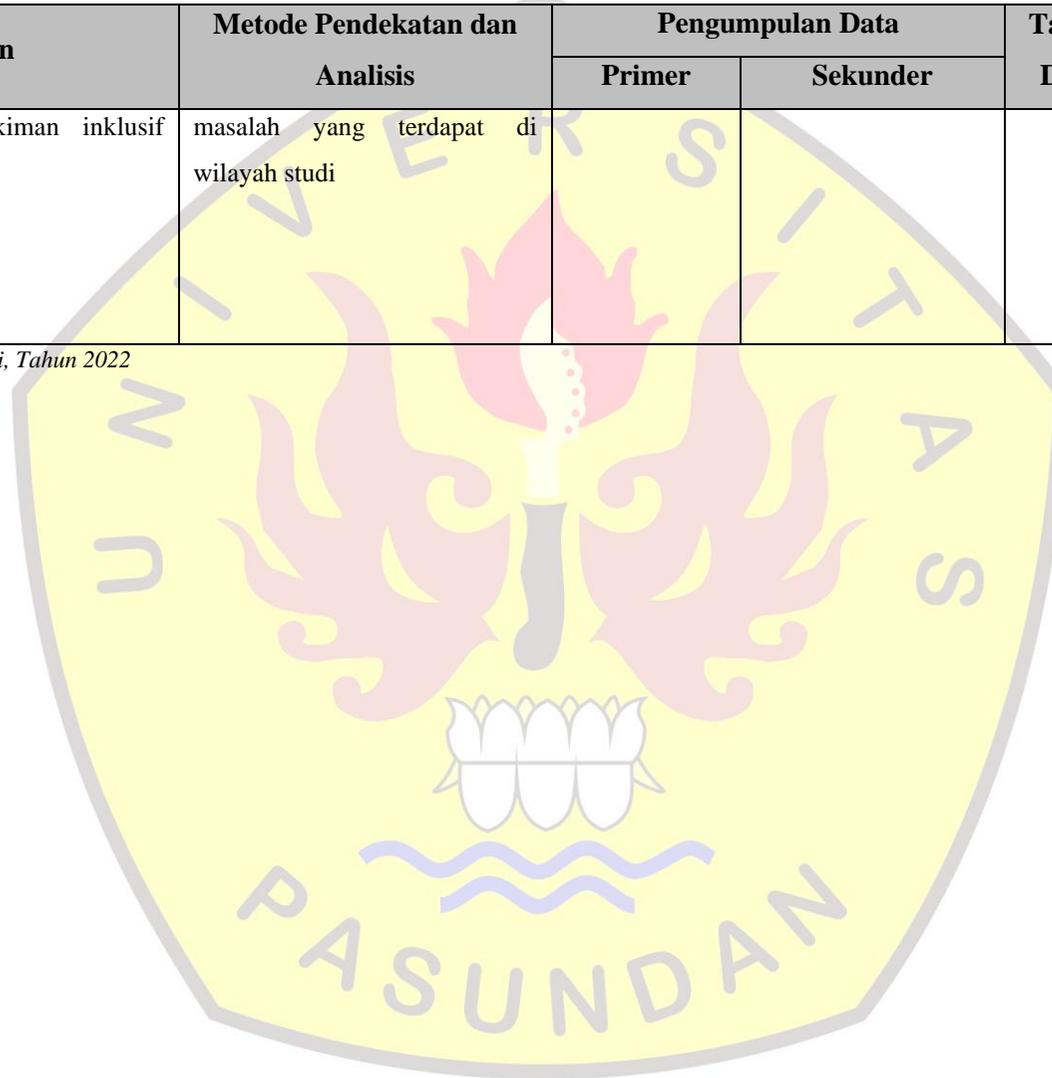
Tabel I. 13 Matriks Analisis

No	Sasaran	Metode Pendekatan dan Analisis	Pengumpulan Data		Tahun Data	Sumber Data
			Primer	Sekunder		
1	Teridentifikasinya karakteristik sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan, serta tingkat kekumuhan di Kawasan Rancabentang Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan.	<p>Metode Deskriptif Kuantitatif</p> <p>Kondisi sosial, ekonomi, fisik</p> <p>Menggambarkan kondisi kependudukan, geografis, sarana dan prasarana (bangunan, drainase, jalan lingkungan, persampahan, APK, Air Limbah, Air Minum), seta legalitas lahan.</p> <p>Tingkat kekumuhan</p> <p>menilai lokasi permukiman kumuh berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan yang telah ditetapkan di dalam Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2016</p>	Observasi dan Kuisisioner	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi Geografis • Kondisi Demografi • Kondisi Sarana dan Prasarana • Kondisi status penggunaan lahan 	2020 dan 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi • Badan Pertanahan Kota Cimahi • BPS Kota Cimahi • Kantor Kelurahan Cibeureum

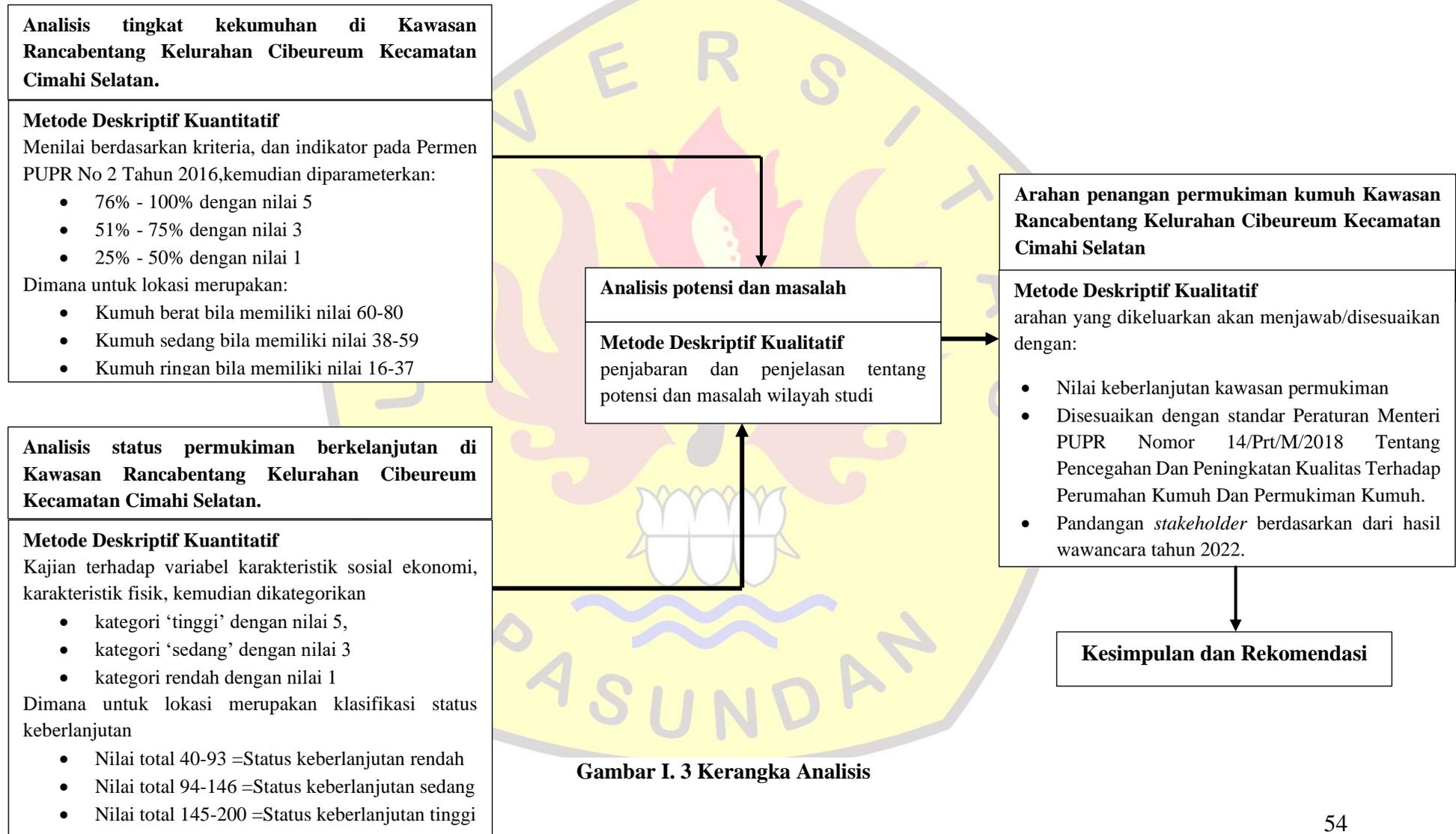
No	Sasaran	Metode Pendekatan dan Analisis	Pengumpulan Data		Tahun Data	Sumber Data
			Primer	Sekunder		
		tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh				
2	Teridentifikasinya status permukiman berkelanjutan di Kawasan Rancabentang Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan.	<p>Metode Deskriptif Kuantitatif Tingkat Keberlanjutan Permukiman</p> <p>Kajian terhadap karakteristik sosial ekonomi, karakteristik fisik bangunan rumah, karakteristik penggunaan PSU (prasarana, sarana dan utilitas) dan karakteristik lainnya (institusional) dapat dilihat atau dianalisis lebih lanjut dalam keberlanjutan permukiman</p>	Observasi dan Kuisisioner	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi dan sebaran sarana dan prasarana Kondisi status penggunaan lahan Jumlah Penduduk 	2020 dan 2022	<ul style="list-style-type: none"> Badan Pertanahan Kota Cimahi BPS Kota Cimahi Kantor Kelurahan Cibeureum
3	Terumuskannya arahan penangan permukiman kumuh Kawasan Rancabentang Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan dalam	<p>Metode Deskriptif Kualitatif Analisis potensi dan masalah</p> <p>yaitu dengan penjabaran dan penjelasan tentang potensi dan</p>	Wawancara	-	2022	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perumahan dan Permukiman (Bidang Pencegahan dan Peningkatan

No	Sasaran	Metode Pendekatan dan Analisis	Pengumpulan Data		Tahun Data	Sumber Data
			Primer	Sekunder		
	mewujudkan permukiman inklusif dan berkelanjutan.	masalah yang terdapat di wilayah studi				Kualitas Kawasan Permukiman) • Ketua,RW 11,RW 12,RW 13,RW 26,RW 28

Sumber : Rumusan Peneliti, Tahun 2022

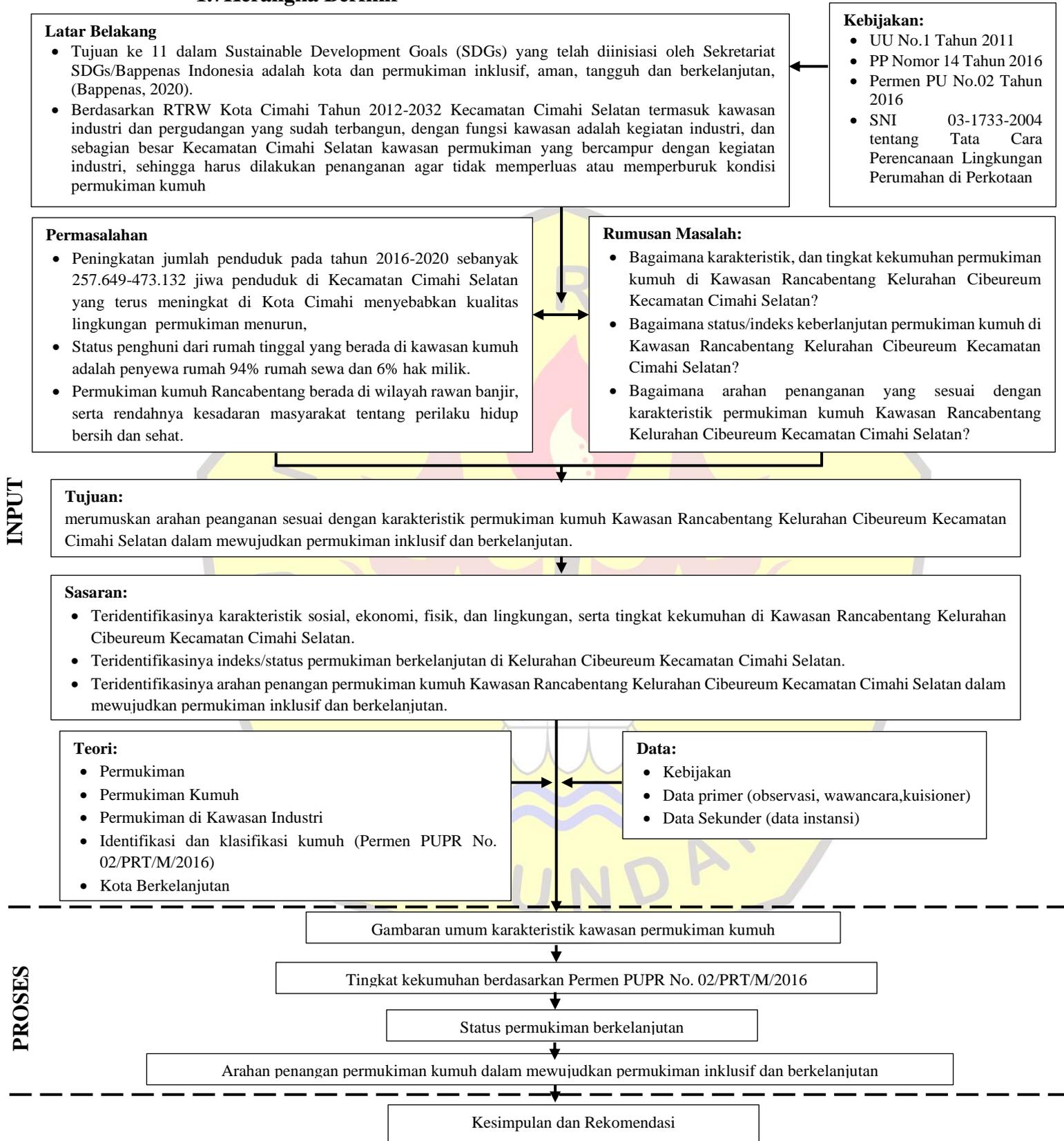


1.6.5 Kerangka Analisis



Gambar I. 3 Kerangka Analisis

1.7 Kerangka Berfikir



Gambar I. 4 Kerangka Berfikir

1.8 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan dari proposal tugas akhir ” Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Dalam Mewujudkan Kota Berkelanjutan”. (Studi Kasus : Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi)” terdiri atas 5 bab sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang dari penelitian, isu permasalahan, tujuan dan sasaran, ruang lingkup substansi dan wilayah, metodologi, batasan studi, kerangka berpikir serta sistematika penyusunan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan teori, tinjauan kebijakan dan best practice (studi terdahulu) yang berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh, dan menjelaskan mengenai metode yang akan digunakan untuk penelitian tugas akhir yang telah dilakukan dan pada akhirnya akan digunakan dalam proses mengeluarkan arahan penanganan permukiman kumuh.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum wilayah kajian baik itu dari eksternal maupun internal di lokasi kajian yaitu di Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

BAB IV ANALISIS

Menjelaskan tentang analisis mengenai tingkat kekumuhan dan status permukiman berkelanjutan di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan, serta Arahan terhadap potensi dan masalah yang berkembang pada kawasan permukiman kumuh.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini menjelaskan terkait dari hasil analisis yang telah dilakukan dengan menarik sebuah kesimpulan dan dari beberapa bab sebelumnya yang telah dijelaskan. Selain itu menjelaskan tentang output dari hasil penelitian berupa sarana sebagaimana merupakan masukan atau rekomendasi terhadap kawasan permukiman di wilayah kajian. Selain itu terdapat pula kelemahan studi penelitian, dan beberapa masukan untuk studi lanjutan yang dapat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pamekas, R. (2018). *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Permukiman*. PT Dunia Pustaka Jaya
- Apriyantika, M. (2018). PEMETAAN PERSEBARAN KAWASAN PERMUKIMAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI KECAMATAN GUNUNGPATI, KOTA SEMARANG. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(2), 10–27.
- Arifuddin Akil. (2017). Eksplorasi Pola Hidup Masyarakat Bugis Sebagai Dasar. *Jurnal Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 327–334.
- Ariyanti, B. N. (2017). *Penanganan permukiman kumuh di bantaran sungai karang mumus kota samarinda*. 5, 6312–6326.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10, 46–62.
- Bappenas. (2020). *Pilar Pembangunan Lingkungan*.
- Chimankar, D. A. (2016). Urbanization and condition of Urban Slums in India. *Indonesian Journal of Geography*, 48(1), 28–38. <https://doi.org/10.22146/ijg.12466>
- Cohen, S. (2018). *THE SUSTAINABLE CITY*. Columbia University Press.
- Deliyanto, B., & Sumartono. (2018). Pengembangan Kawasan Permukiman dan Keberlanjutan Kota. *Seminar Nasional FMIPA Universitas Terbuka 2018*, 263–279.
- Ervianto, Wulfram I. (2019). Di Perkotaan Sustainable Urban Slums Management. *Jurnal Spektran*, 7(2), 178–186.
- Ervianto, Wulfram Indri. (2018). Kajian Tentang Kota Berkelanjutan Di Indonesia (Studi Kasus Kota Yogyakarta). *Jurnal Media Teknik Sipil*, 16(1), 60.

<https://doi.org/10.22219/jmts.v16i1.4995>

- Hariyanto, A. (2007). Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Yang Sehat (Contoh Kasus : Kota Pangkalpinang). *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota UNISBA*, 7(2), 11-37–37.
- Kustiwan, I., & Ramadhan, A. (2019). Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Kampung-Kota dalam Rangka Pembangunan Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan: Pembelajaran dari Kasus Kota Bandung. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2019.3.1.64-84>
- Madidir, K., & Bitung, K. (2019). ISSN 2442-3262 *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri , bertujuan untuk : a . Mengendalikan pemanfaatan ruang ; b . Meningkatkan upaya .* 6(2), 282–290.
- Muliarto, H., Nurhasanah, I. S., & Persada, C. (2017). “ *Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa – Kota*” (Issue November 2016).
- Nugraha, Y., Nugraha, M. F., & Abdillah, A. (2021). *ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS BERMUKIM DI KAMPUNG PADAT PERKOTAAN (STUDI KASUS KAMPUNG ANALYSIS OF QUALITY IMPROVEMENT STRATEGY OF SETTLING IN URBAN DENSE VILLAGES (CASE STUDY OF NYENGSERET CITY VILLAGE)*. 19(1), 12–21.
- Pradani, D. P. (2017). *KLASIFIKASI KARAKTERISTIK DAMPAK INDUSTRI PADA KAWASAN*. 15.
- Priyoga, I. (2010). Desain Berkelanjutan (Sustainable Design). *Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Pandanaran*, 8(1), 16–26.
- Qonita, C., Qonita, C. D., & Rahmawati, D. (2021). Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh di Area Pendukung Industri Kelurahan Krian, Kabupaten

Sidoarjo. *Jurnal Teknik ITS*, 9(2), C231–C238.
<http://ejournal.its.ac.id/index.php/teknik/article/view/56302%0Ahttps://ejournal.its.ac.id>

Setiawan, B. (2007). Indikator Keberlanjutan Kota di Indonesia: Studi Komparasi Empat Kota di Jawa. *Manusia Dan Lingkungan*, 14(1), 1–14.

Sushanti, I. R., Ridha, R., Yuniarman, A., & Hamdi, A. I. (2020). Strategi Penanggulangan Kerusakan Rumah Tinggal Pasca Bencana Gempa Bumi Di Kawasan Permukiman. *Jurnal Planoearth PWK FT Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2, 17–24.

Wijaya, D. W. (2016). Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(1), 1–10.
<https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.01.1>

Fatimah, F. N. A. D. (2016). *Teknik Analisis SWOT*. Anak Hebat Indonesia.

Susetyo, Budi. (2017). *Statistika Untuk Analisis Data Penelitian*. PT Refika Aditama

Joga, Nirwono. (2017). *Kota Cerdas Berkelanjutan*. PT Gramedia Pustaka Utama

Rusli, Said. (2014). *Pengantar Ilmu Kependudukan*. LP3ES

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/Prt/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/Prt/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Permen Perumahan Rakyat No.10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
SK Walikota Cimahi Nomor 653/ Kep.68.PU/2015 tentang Lokasi Lingkungan
Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh di Kota Cimahi Tahun 2015
Kecamatan Cimahi Selatan Dalam Angka Tahun 2020

